



**LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG SUMBER DAYA ALAM
(RPJPD, RPJMD, RKPD)
TAHUN 2024**



BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. DASAR HUKUM	5
1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	7
1.4. URAIAN KEGIATAN	8
BAB II.....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
2.1 Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan.....	9
2.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	11
1. Brainstorming dan permintaan saran/masukan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	13
2. FGD dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.....	13
3. Rapat Orientasi Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045 tanggal 12 Januari 2024	18
4. FGD RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA.....	19
BAB III.....	20
LAMPIRAN	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya.

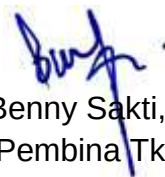
Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan adalah juga cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan–keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta mengumpulkan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang sumber daya alam antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan sub kegiatan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Desember 2024

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,



Ir. Benny Sakti, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19670927 199403 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan pada dasarnya berupa penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki. Selain itu, perencanaan merupakan pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu.

Agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sebaik-baiknya, suatu perencanaan sebaiknya juga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur tujuan, yaitu perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan untuk mencapai.
- b. Unsur *policy* (kebijaksanaan), yaitu metode atau cara untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.
- c. Unsur prosedur, meliputi pembagian tugas serta hubungannya secara terperinci.
- d. Unsur *progress* (kemajuan).
- e. Unsur program.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan adalah

upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah memuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat terpilih tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Misi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam adalah meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital serta meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diperlukan penyusunan dokumen perencanaan yang matang dan akurat dengan memperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi dan sumber daya alam maka dilaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD).

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang SDA antar perangkat daerah serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.2. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 ;
- 12 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Barat Tahun Anggaran 2024;

- 13 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 16 Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/04/II/Set/Bappeda-2024 tanggal 3 Februari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 17 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2024, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan bidang SDA.

3. Melakukan koordinasi di bidang SDA dengan pusat, regional dan internasional.

1.4. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD awal Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 79.950.000,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 38.470.000,- yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi terkait penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
2. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang SDA
3. Melaksanakan koordinasi terkait lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan lingkup bidang SDA
5. Pengadaan alat tulis
6. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip meliputi :

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan :

1. Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

4. Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2024 ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat memulai proses penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045. Di samping juga menyusun dokumen perencanaan tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi dan sumber daya alam maka dilaksanakanlah kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Ruang lingkup kegiatan meliputi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada sub kegiatan ini dijabarkan sebagai berikut.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta juga kolaborasi antar pelaku Pembangunan dan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan Perencanaan Pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Salah satu urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan segera berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain itu, RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Urgensi selanjutnya dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada Tahun 2024. RPJPD Tahun 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon

bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat.

Berikut beberapa tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen :

1. Brainstorming dan permintaan saran/masukan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Dalam rangka proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 maka dilaksanakan *brainstorming* dan permintaan saran/masukan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 terkait Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di setiap sektor SDA. Rapat ini bertujuan untuk menjabarkan terkait permasalahan dan isu strategis secara detail dari masing-masing indikator yang terdapat di dalam dokumen RPJPD. Rapat dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/11//Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 24 Januari 2024 dan dilaksanakan pada tanggal 25-26 Januari 2024.

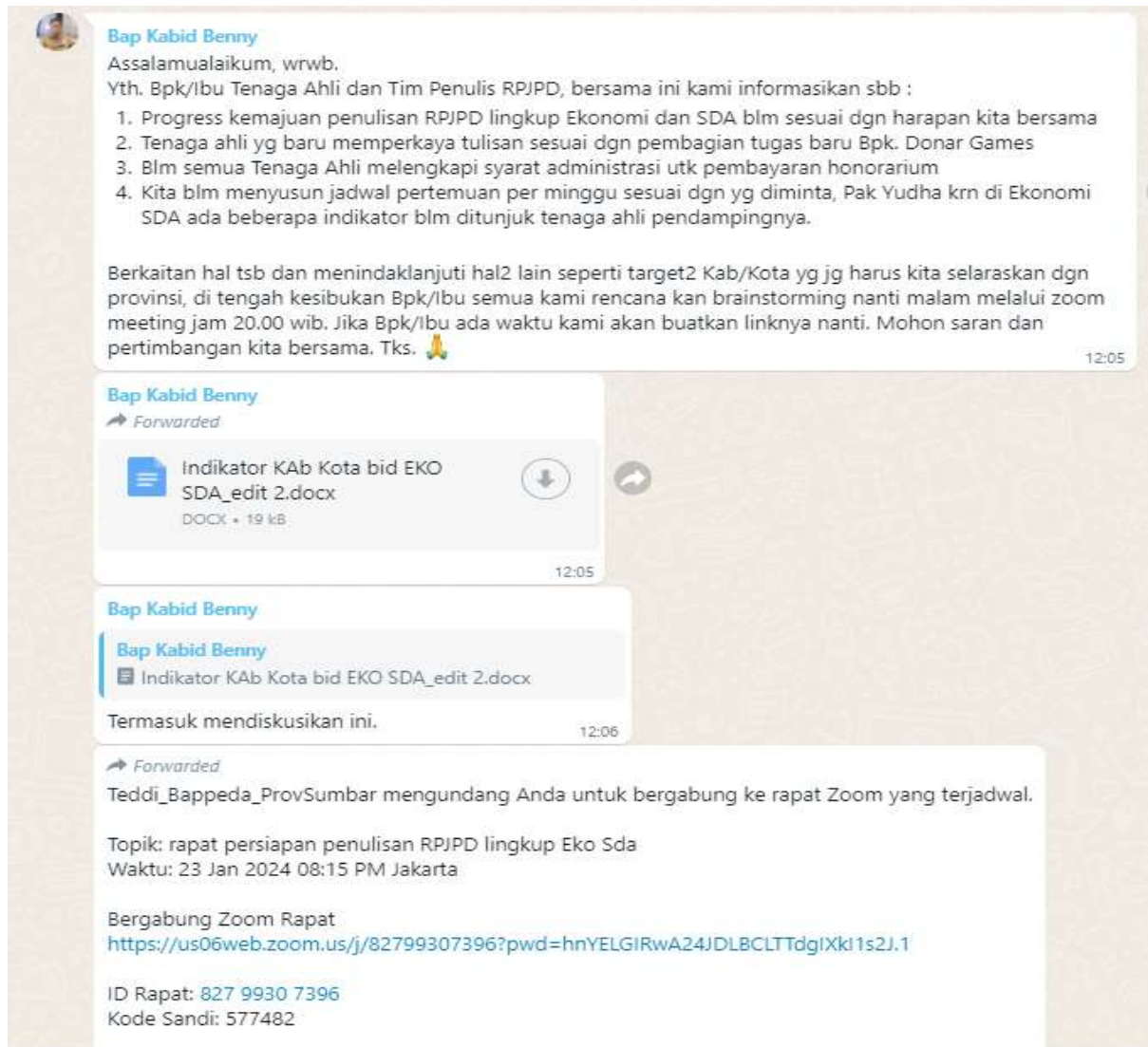
2. FGD dalam rangka penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

FGD dilakukan secara zoom dengan menghadirkan tim ahli penyusun dokumen RPJPD. FGD dilakukan beberapa kali agar dapat memperkaya rancangan awal dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Link rekaman pertemuan :

https://drive.google.com/file/d/1CY8SvJdljvRvS3A6HP_OZZCzc3Szh7n/view?usp=drive_link

➤ 23 Januari 2024



➤ 11 Februari 2024



➤ 4 Maret 2024

Bap Teddy Rafdianto

Bappeda_ProvSumbar mengundang Anda untuk bergabung ke rapat Zoom yang terjadwal.

Topik: RAPAT RPIPD SUMBAR
Waktu: 4 Mar 2024 08:00 PM Jakarta

Bergabung Zoom Rapat
<https://us06web.zoom.us/j/83449931066?pwd=0Dop0n7K34oNn26thVVyRvelU8k5mPA.1>

ID Rapat: 834 4993 1066
Kode Sandi: 089920

Sekali ketuk pada ponsel
+15074734847,,83449931066#...*089920# Amerika Serikat
+15642172000,,83449931066#...*089920# Amerika Serikat

Telepon berdasarkan lokasi Anda

- * +1 507 473 4847 Amerika Serikat
- * +1 564 217 2000 Amerika Serikat
- * +1 646 558 8656 Amerika Serikat (New York)

➤ 2 April 2024

Bap Yudha Prima 1/4/2024

Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the

us06web.zoom.us

Bapak Ibu Tenaga Ahli dan Teman2 Bappeda..

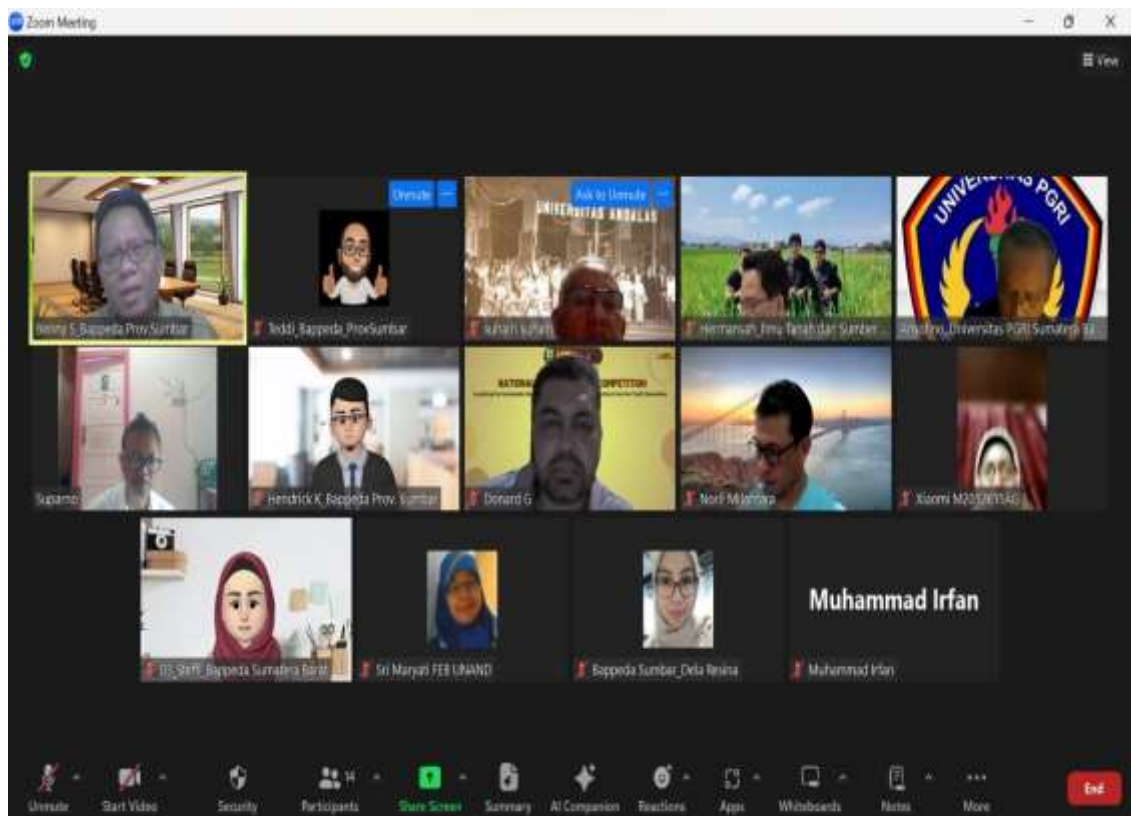
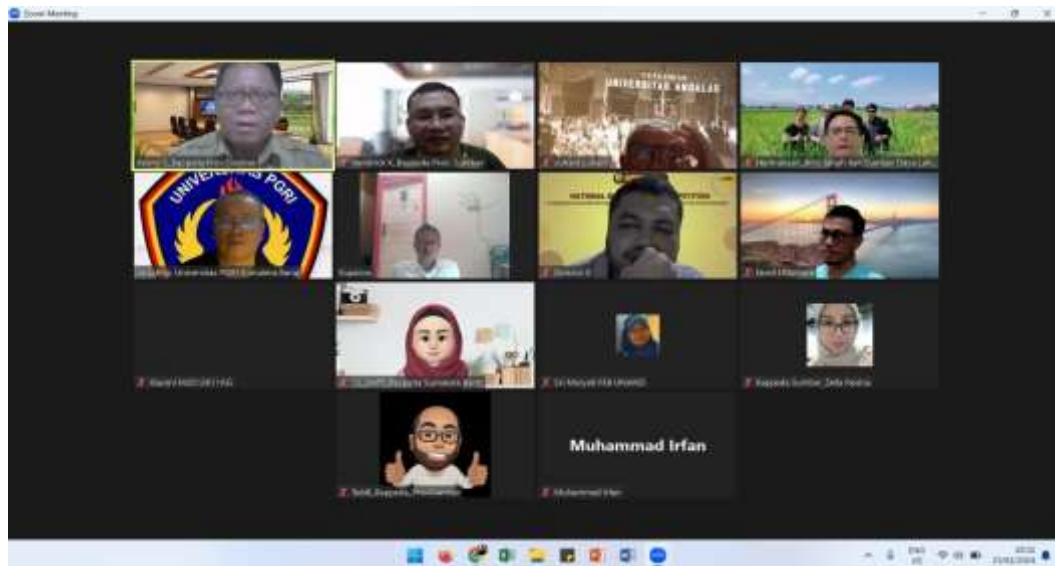
mempertimbangkan banyak dari Bapak Ibu Tenaga Ahli yang berhalangan hadir (bisa hadir melalui online) maka direncanakan rapat besok tanggal 2 April 2024 kita laksanakan melalui online dengan zoom meeting dengan waktu yang sama yakni dimulai pukul 0900 WIB

dengan link :

<https://us06web.zoom.us/j/86116726859?pwd=ndAL09bWkT984Z9MEyjrKQgagV8YgN.1>

ID Rapat: 861 1672 6859
Kode Sandi: 967898

10/31



3. Rapat Orientasi Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
tanggal 12 Januari 2024



4. FGD RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA

Sehubungan dengan telah berjalannya proses penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045, maka perlu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 bersama tim ahli penulisan. Rapat ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Rapat dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/16/II/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 26 Februari 2024.

Di samping penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-245 juga dilakukan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) sangatlah penting dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan di lingkup bidang sumber daya alam. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan bidang sumber daya alam. Disamping itu juga diperoleh informasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) pada tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan yang telah disusun karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia, namun secara substansi dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan dapat dicapai sesuai dengan anggaran yang tersedia.

LAMPIRAN

1. Surat Undangan Brainstorming dan permintaan saran/masukan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 24 Januari 2024

Nomor : 050/11/I/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :
Bapak/Ibu Tim Ahli Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam
(terlampir)

di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 maka diundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : 1. Kamis/25 Januari 2024 (pembahasan lingkup SDA)
2. Jumat/26 Januari 2024 (pembahasan lingkup perekonomian)
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt. II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda : 1. *Brainstorming* dan permintaan saran/masukan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
2. Hal-hal lain yang dirasa perlu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

Meddewandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Lampiran 1

Surat Nomor : 050/ /I/EKO-SDA/Bappeda-2024
Tanggal : Januari 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu Tim Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam :

1. Dr. Suparno, M. Si
2. Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS, M.Sc
3. Dr. Sri Maryati, SE, M.Si
4. Dr. Donard Games, SE, M.Bus
5. Dr. Suhairi, SE, M.Si, Akt
6. Prof. Dr. Ansofino, M.Si
7. Dr. Muhammad Irfan M.Si

2. Notulen Rapat Brainstorming dan permintaan saran/masukan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

NOTULEN RAPAT

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	:	Kamis, 25 Januari 2024 Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dasar	:	Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/11/I/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 24 Januari 2024
Pimpinan Rapat	:	Fungsional Perencana Bidang Ekonomi-SDA
Peserta Rapat	:	1. Tim Ahli Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 lingkup Bidang Ekonomi SDA 2. Tim Penyusun RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 lingkup Bidang Ekonomi SDA
Agenda Rapat	:	<i>Brainstorming</i> dan permintaan saran/masukan rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
Pembahasan	:	1. Penyampaian Hasil ToT Indikator yang digunakan dalam dokumen RPJPD Provinsi sudah mandatory dari pusat. Penambahan indikator dimungkinkan menjadi sub indikator (selagi masih ada hubungan dengan 45 indikator yang ditetapkan). 2. Hermansyah Perlu dijelaskan definisi operasional masing-masing indikator, berapa ketidakcukupan itu? Indikator Indeks Kemandirian Pangan bisa kita pakai. Dapat ditambahkan data terkait proporsi penduduk yang masih rawan ketidakcukupan konsumsi pangan. Tentukan probabilitas munculnya individu rawan pangan (daerah mana). Tambahkan kebutuhan energi per kapita. Sistematika penulisan agar diperbaiki lagi. Bagaimana penurunan indikator ke kab/kota. Perlu upaya untuk mencapai target 2045. Arah kebijakan untuk mencapai target 2045 itu seperti apa? Terkait pangan harus dari hulu dan hilir nya. Perlu diperhatikan kehilangan pangan. Berapa kebutuhan beras per kapita per tahun? Diskusi dengan BPS bagaimana perhitungan data. Cukup kuantitatif, baru kualitas. Permasalahan terkait PoU belum ada. 3. Irfan Jika data kemiskinan lengkap maka bisa dianalisis, termasuk Po, P1 dan P2. Gunakan indikator yang rilis nasional. Apakah bisa kita pakai pendekatan kemiskinan (garis kemiskinan) untuk mengukur PoU? Perlu ketersediaan data tahunan. 4. Suparno a. Ekonomi Biru : Apakah harus dilakukan proyeksi data dengan ketersediaan data yang ada, 2 tahun data terhadap 20 tahun RPJPD. Pengembangan ekonomi biru harus memperhatikan kondisi lokal dengan memperhatikan potensi sektor perikanan dan kelautan dengan mempertimbangkan upaya pengembangan potensi pariwisata kuliner dan bahari.

		Pengembangan isu permasalahan ekonomi biru fokus pada wilayah laut dikarenakan potensi budidaya yang dinilai masih rendah. b. Indeks keanekaragaman hayati : Ketersediaan data dari Bappenas belum ada gambaran. Diupayakan menyusun indeks dengan mempelajari materi hasil ToT yang sudah memunculkan beberapa indikator yang akan diupayakan sambal menunggu data resmi. c. Ekonomi hijau (plus masukan Prof. Hermansah): Indikator penurunan emisi gas rumah kaca, dibuthkan data dasar/<i>baseline</i> emisi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dan kontribusi Sumatera Barat secara nasional. Kontribusi menurunkan gas emisi rumah kaca. Tambahkan mitigasi dan adaptasi, dan perubahan iklim. Penambahan data komparasi antara Sumatera Barat dengan daerah lain di Indonesia. Pengukuran produktivitas pertanian oleh komoditas padi dapat didorong melalui intensifikasi namun perlu memperhatikan apakah kondisi tersebut sudah menguntungkan petani yang dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani. Produktivitas sawit perlu menambahkan kondisi rata-rata umur tanaman sawit yang ada. Penguatan pilar sosial melalui pengembangan perhutanan sosial.
Kesepakatan/ Tindak Lanjut	:	1. Tim ahli bantu merumuskan terkait permasalahan, isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan serta target kab/kota. 2. Hasil tulisan disampaikan ke Bappeda tanggal 29 Januari 2024. 3. Agenda pertemuan selanjutnya : setelah ranwal pembahasan dengan kemendagri
Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,



Dela Resina

3. Surat Undangan FGD RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 7054555-7055627-7054374
E-mail: bappeda@sumbarprov.go.id Homepage: <http://bappeda.sumbarprov.go.id>

Padang, 26 Februari 2024

Nomor : 050/ 16 /II/Eko-SDA/Bappeda-2024
Lamp. : 2 (satu) lembar
Perihal : Undangan FGD RPJPD
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang
Ekonomi dan SDA

Kepada Yth. :
Daftar Terlampir
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berjalannya proses penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045, maka perlu dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 bersama tim ahli penulisan. Oleh sebab itu diundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada ;

Hari/Tanggal : (Jadwal terlampir)
Pukul : (Jadwal terlampir)
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda : *Focus Group Discussion (FGD)* :
1. Indikator Utama Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat
2. Rumusan Sasaran Visi Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Rumusan arah kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Penghitungan target Provinsi dan Kabupaten/Kota

Adapun draf awal Rancangan Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dapat di akses melalui link <https://sumbar2045.sumbarprov.go.id/rpjpd/dokumen>. Diharapkan OPD dapat menyiapkan materi untuk pembahasan saat FGD.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,



Lampiran 1**Surat Nomor : 050/ 16/II/EKO-SDA/Bappeda-2024****Tanggal : 26 Februari 2024****Kepada Yth. :**

No	Peserta Rapat	Jumlah
Tim Ahli Penulisan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045		
1	Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS, M.Sc	1 orang
2	Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus	1 orang
3	Prof. Dr. Ansofino, M.Si	1 orang
4	Dr. Suhairi, SE, M.Si, Akt	1 orang
5	Dr. Sri Maryati, SE, M.Si	1 orang
6	Dr. Suparno, M. Si	1 orang
7	Dr. Muhammad Irfan	1 orang
8	Ir. Noril Milantara, S.Hut., M.Si., IPM	1 orang
OPD Terkait Provinsi Sumatera Barat		
9	BPS Provinsi Sumatera Barat	2 orang
10	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	3 orang
11	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	3 orang
12	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	3 orang
13	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat	3 orang
14	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	3 orang
15	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	3 orang
16	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	3 orang
17	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	3 orang
18	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	3 orang
19	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	3 orang
20	Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat	3 orang
Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat		
21	JFP Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	5 orang
22	Pelaksana Bidang Ekonomi-SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	12 orang

Lampiran 2

Agenda FGD RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA

No	Hari/Tanggal	Waktu	Agenda	Peserta
1	Kamis 29 Februari 2024	09.00 – Selesai	FGD Lingkup Bidang SDA	1. Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS, M.Sc 2. Dr. Suparno, M. Si 3. Dr. Muhammad Irfan 4. Ir. Noril Milantara, S.Hut., M.Si., IPM 5. BPS Provinsi Sumatera Barat 6. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat 8. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 10. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2	Jum'at 1 Maret 2024	09.00 – 12.00 WIB	FGD Sektor Koperasi UKM & Ekraf	1. Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus 2. BPS Provinsi Sumatera Barat 3. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat 4. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
3	Jum'at 15 Maret 2024	09.00 – 12.00 WIB	FGD Sektor Pariwisata	1. Prof. Dr. Ansofino, M.Si 2. BPS Provinsi Sumatera Barat 3. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
4	Jum'at 8 Maret 2024	13.00 – Selesai (diawali dengan makan siang)	FGD BUMD & Pajak Daerah Terhadap PDRB	1. Dr. Suhairi, SE, M.Si, Akt 2. BPS Provinsi Sumatera Barat 3. Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
5	Jum'at 8 Maret 2024	09.00 – Selesai	FGD Sektor Perindag dan Kewirausahaan	1. Prof. Dr. Donard Games, SE, M.Bus 2. Dr. Sri Maryati, SE, M.Si 3. BPS Provinsi Sumatera Barat 4. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat 5. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

4. Notulen FGD RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676

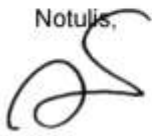
NOTULEN RAPAT

Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Selasa, 29 Februari 2024 Ruang Rapat Bappeda Sumatera Barat Lt. I
Dasar	: Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/16/II/Eko-SDA/Bappeda-2024 tanggal 26 Februari 2024
Pimpinan Rapat	: Perencana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: 1. Tim Ahli Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 2. BPS Provinsi Sumatera Barat 3. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 6. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 8. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Agenda Rapat	: FGD RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup Bidang SDA
Pembahasan	: <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 membahas : 1. Indikator Utama Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat 2. Rumusan Sasaran Visi Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Rumusan arah kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Penghitungan target Provinsi dan Kabupaten/Kota Indicator Utama Pembangunan RPJPD lingkup SDA meliputi : 1. Prevalence of Undernourishment (PoU) / Prevalensi Ketidacukupan Pangan Dinas Pangan Poin penting pelaksanaan urusan pangan saat ini adalah kedaulatan pangan daerah. Secara umum, kondisi neraca bahan makanan Sumbar selalu surplus. Namun demikian pada kenyataannya, pengendalian terhadap ketersediaan pangan itu sendiri tidak dapat dilakukan karena dipengaruhi oleh kondisi faktor alam yang cenderung tidak stabil. Selain itu adanya kecenderungan kondisi impor pangan yang cukup besar, contoh terkait adalah tepung. Sehingga diperlukan upaya diversifikasi pangan dengan pemanfaatan dan pengembangan pangan local sebagai substitusi seperti halnya penggunaan tepung yang bersumber dari dalam daerah untuk mendorong kemandirian pangan daerah yang dinilai masih kurang. Salah satu implementasi yang dilakukan seperti halnya pemanfaatan produk pangan local dalam produksi mie yang berbahan baku mokaf hasil pengolahan dari ubi kayu. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kemandirian pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar. Sumbar memiliki produksi yang cukup bagus, untuk itu perlu punya pasar induk untuk membantu dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan daerah. Selain ketersediaan pangan, keamanan konsumsi pangan menjadi hal yang penting dan saat ini masih kurang diperhatikan terutamanya produksi

	pangan yang aman dengan memperhatikan sumberdaya lahan dan pakan untuk mengurangi tingkat cemaran produksi pangan yang dihasilkan. Nilai PoU dalam ranwal RPJPD terkendala ketersediaan data sehingga untuk proxy ke Kabupaten/Kota saat ini menggunakan nilai IKP. IKP Sumbar merupakan 5 terbaik nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan. BPS Indikator PoU diperoleh dari data Susenas yang dilaksanakan setiap tahunnya yang dilaksanakan 2x dalam setahun yaitu bulan Maret dan September. Untuk angka turunan hingga Kabupaten/Kota diperoleh dari data Susenas di Bulan Maret berdasarkan data konsumsi per keluarga per kapita Data terakhir tahun 2023 saat ini sudah tersedia dengan Sumbar berada pada peringkat 15 secara nasional, sementara pada tahun 2022, Sumbar di peringkat 7. Angka ini menggunakan survey dengan sampling 11.750 rumah tangga di Sumatera Barat dengan pengambilan sample melalui treatment efektif dan efisien oleh petugas pengawas yang telah dilatih secara khusus. Kenaikan nilai PoU setiap tahun selalu meningkat, hal ini perlu kita perhatikan faktor penyebabnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa fenomena, seperti kenaikan harga barang, akses air bersih dan air minum. Penyediaan data PoU akan di rilis sesuai arahan pusat dengan penggunaan pertanyaan kuesioner tetap setiap tahunnya. Untuk mengakomodir ketersediaan data PoU yang dapat diakses oleh Publik terutama Kabupaten/Kota, BPS Sumatera Barat akan menyediakan tampilan data PoU pada menu Tabel Dinamis pada website BPS Sumatera Barat. Dinas Pangan Apakah data PoU ini dapat kita akses setiap bulannya? Tren setiap bulannya seperti apa. Indicator PoU ini terlalu sempit, IKP lebih luas. IKP meliputi banyak sektor, begitupun indicator PoU. Perlu koordinasi dengan banyak sektor. Tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pangan saja. Hermansah Perlu persamaan persepsi terkait indikator yang digunakan. Saran, IKP tetap digunakan. Data yang diperoleh harus komprehensif. Arah kebijakan yang bisa kita ambil salah satunya adalah melindungi sumber daya alam. Untuk indicator ini perlu integrasi dengan beberapa aspek seperti perdagangan. Sasaran indicator ini adalah Indonesia tanpa kelaparan nantinya dan bebas stunting. Survey ini apakah sudah mewakili kondisi di Sumbar atau tergantung kondisi suatu daerah termasuk bencana alamnya agar ada kejelasan informasi untuk menentukan strategi terkait ketahanan pangan? Peta kerawanan pangan perlu diperhatikan. Masalah : alih fungsi lahan. M. Irfan Komponen penyusun pangan beragam, termasuk dari konsumsi protein. Sumber pemenuhan pangan perlu dikaji lebih dalam, apakah dari sayuran, daging, telur dan susu.
--	---

	2. Koefisien Variasi Harga Antar Waktu M. Irfan Komponen biaya logistik yang tinggi per masing-masing daerah harus diperhatikan. Pahami karakteristik harga yang tidak stabil untuk menjaga stok ketersediaan pangan (data Kementerian Perdagangan). Indikator ini perlu keterlibatan dari beberapa sektor seperti pangan, pertanian, logistik. Ada beberapa bahan pokok yang tidak dicantumkan. 3. Indeks Ekonomi Hijau Secara teknis, data Indeks Ekonomi Hijau sudah disediakan oleh Bappenas dengan target dan baseline Sumatera Barat mengacu pada SEB Buku II. Proxy Ekonomi Hijau pada Kabupaten/Kota menggunakan indikator Kontribusi PDRB sektor pertanian secara umum dan produktivitas tenaga kerja pada sektor tersebut menggunakan asumsi keseragaman dan ketersediaan data seluruh Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan potensi lingkungan dalam menghasilkan nilai ekonomi dalam mendukung ekonomi hijau dengan harapan produktifitas pertanian tidak menyebabkan adanya alih fungsi lahan. BPS dan Dinas Pertanian Ketersediaan data untuk proxy indikator tersebut sudah tersedia dan dianggap mampu sebagai indikator dengan mempertimbangkan factor ketergantungan data antar wilayah dan antar waktu. 4. Indeks Ekonomi Biru Suparno Indonesia adalah negara maritim. Kemaritiman sangat penting, indikator pembangunan yang diturunkan menjadi indeks ekonomi biru yang meliputi kegiatan kemaritiman berupa perikanan tangkap, pariwisata bahari, transportasi logistic di wilayah laut. Proxy indikator ekonomi biru ke Kabupaten/Kota lebih mengacu pada indikator RPJPN berupa PDB sektor maritime yaitu PDRB sektor perikanan. Indikator ini hanya difokuskan pada 7 Kabupaten/Kota di wilayah pesisir Sumatera Barat. 5. Indeks Keanekaragaman Hayati Dinas Kehutanan Penyusunan IKH dilakukan secara mandiri berdasarkan modul yang disampaikan oleh Tim TOT RPJPD dengan dukungan ketersediaan data dari Dinas Perkebunan Tanaman pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Permintaan data diharapkan sudah disampaikan ke Bappeda pada tanggal 1 Maret sebagaimana surta Bappeda ke OPD. Perhutanan sosial: pemberian hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Isu perhutanan sosial dan kebakaran hutan masih berlanjut. Hermansah Biodiversifitas erat kaitannya dengan emisi karbon. Sebaiknya di indeks ekonomi hijau juga membahas tentang perdagangan karbon. Hutan berkaitan dengan jasa lingkungan, tapi belum masuk sektor perhitungan PDRB. Strategi terkait deforestasi. Bagaimana kontribusi Sumbar untuk menurunkan emisi?
--	---

		Untuk Dinas Pertanian, bisa ditambahkan data pupuk subsidi dan non subsidi? Selain itu, baiknya mengklarifikasi pupuk organic dan non organic. Masalah : ada sawah yang dibuat di Kawasan bukan sawah. Dinas Pertanian Hanya menyalurkan pupuk subsidi (data sudah ada). Solusi : memanggil distributor pupuk untuk menghitung yang non subsidi. Pupuk subsidi lebih besar diperuntukkan untuk padi. Luas sawah : menggunakan data ATR BPN. Walaupun di lapangan tidak sesuai. Produksi pertanian dihitung berdasarkan kerangka sample area, sehingga terjadi ketidakcocokan data. Dinas Kehutanan Permasalahan : Luas baku sawah ada yang digunakan untuk permukiman. Butir 5 dan 6 masih konsesi. 6. Kemiskinan M. Irfan Penggunaan indikator kemiskinan sesuai arahan pusat sudah dapat diturunkan hingga level Kab/Kota dengan ketersediaan data berdasarkan kemiskinan makro dari BPS pada wilayah Provinsi hingga Kbaupaten/Kota. Saran ditambahkan kemiskinan menurut MPI.
Kesepakatan/ Tindak Lanjut	:	1. Indikator yang digunakan saat ini masih mengacu sesuai yang ditetapkan oleh pusat beserta target dan arah kebijakannya. 2. Akan diagendakan pertemuan berikutnya untuk membahas target serta arah kebijakan masing-masing indikator.
Dokumentasi	:	
Penutup	:	Demikian disampaikan, terima kasih.

Notulis,

Dela Resina

5. Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Lingkup SDA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Secara Astronomis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 30 30' Lintang Selatan (LS), dan 980 36' sampai 1010 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.119,54 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 218 pulau yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 114 pulau, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 48 pulau, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 pulau, Kabupaten Agam sebanyak 2 pulau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 26 pulau, Kota Padang sebanyak 21 pulau, Kota Pariaman sebanyak 4 pulau dan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 pulau

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas jika dikaitkan dengan keberadaan luas Kawasan hutan dan konservasi perairan ternyata dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, bahwa total jumlah luas hutan dan perairan di Sumatera Barat pada tahun 2023 yakni 2.278.161,53 Ha, dengan komposisi yakni Hutan Lindung sekitar 768.615,16 Ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam sekitar 769.923,31 Ha, Hutan Produksi Terbatas sekitar 227.146,07 Ha, Hutan Produksi Tetap sekitar 353.994,82 Ha dan Hutan Produksi yang dapat di konversi sekitar 158.482,17 Ha, dengan rincian pada Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1.	Kab. Kep. Mentawai	7.212,95	183.269,63	-	250.822,27	50.687,32	491.992,17
2.	Kab. Pesisir Selatan	22.435,37	283.209,35	45.255,70	3.953,16	31.135,88	385.989,46
3.	Kab. Solok	117.417,24	47.388,32	10.980,59	4.477,36	9.873,36	190.136,87
4.	Kab. Sijunjung	77.268,61	41.514,22	28.107,41	19.077,37	4.468,79	170.436,40
5.	Kab. Tanah Datar	18.421,98	20.061,04	-	7.304,05	32,95	45.820,02
6.	Kab. Padang Pariaman	13.344,55	15.219,90	-	-	-	28.564,45
7.	Kab. Agam	20.000,30	28.869,41	7.321,31	2.493,89	8.767,05	67.451,96
8.	Kab. Lima Puluh Kota	116.394,79	20.140,14	20.359,92	3.904,19	11.164,21	171.963,25
9.	Kab. Pasaman	196.386,70	32.821,55	29.717,05	-	4.888,77	263.814,07
10.	Kab. Solok Selatan	82.691,41	65.939,34	53.456,60	12.780,63	13.181,74	228.049,72
11.	Kab. Dharmasraya	10.125,75	4.906,05	28.069,77	26.767,87	14.956,27	84.825,71

12.	Kab. Pasaman Barat	73.387,71	268,30	3.595,18	18.051,57	5.110,46	100.413,22
13.	Kota Padang	12.599,39	25.423,88	245,33	-	-	38.268,60
14.	Kota Solok	298,96	883,06	-	-	-	1.182,02
15.	Kota Sawahlunto	116,77	-	37,21	4.362,46	4.215,37	8.731,81
16.	Kota Padang Panjang	241,98	3,42	-	-	-	245,40
17.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	270,70	-	-	-	-	270,70
19.	Kota Pariaman	-	- 5,70	-	-	-	5,70
Jumlah		768.615,16	769.923,31	227.146,07	353.994,82	158.482,17	2.278.161,53

Pada Tahun 2023, Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,55% dari total luas Hutan Lindung di Sumatera Barat, kemudian oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 15,27% dan 15,14%.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan, antara lain:

Kawasan Perikanan dan Kelautan : terbagi dalam 2 aktivitas yaitu perikanan air tawar (di daratan) dan perikanan laut/air payau (di wilayah laut). Aktivitas perikanan laut antara lain Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah lautan (termasuk kawasan pantai), maka potensi pembangunan yang dimiliki adalah dalam aktivitas budidaya pembesaran dan penangkapan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan laut yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat

perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Samudra Indonesia yang terletak di kawasan Pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan Tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik, sementara aktivitas perikanan air tawar dalam bentuk pembenihan, pembesaran hampir seluruh kabupaten/kota memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kawasan Tanaman Pangan antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai “lumbung pangan” Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Guna meningkatkan produktivitas lahan, maka daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ke depan daerah ini akan terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga terutama Riau.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.11

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian.Kehutanan dan Perikanan	22,15	22,36	21,69	21,20	21,04
Pertambangan dan Penggalian	4,30	4,28	4,19	4,09	4,08
Industri Pengolahan	8,38	8,64	8,79	8,54	8,41
Pengadaan Listrik & Gas	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
Pengadaan Air.Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	10,09	10,16	10,18	10,06	10,15
Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil	15,79	15,77	15,84	16,50	16,55

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
dan Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	12,60	10,44	10,29	10,88	11,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,43	1,24	1,27	1,35	1,37
Informasi dan Komunikasi	5,81	6,43	6,61	6,68	6,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	3,04	3,27	3,23	3,08
Real Estate	2,01	2,06	2,04	2,02	2,08
Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,43	0,42	0,44
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,13	6,72	6,89	6,52	6,33
Jasa Pendidikan	4,35	4,71	4,65	4,62	4,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,62	1,69	1,65	1,70
Jasa Lainnya	2,00	1,88	1,95	2,05	2,11
PDRB SUMATERA BARAT (%)	100	100	100	100	100

Jika dilihat pada tabel Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha diatas maka sejak tahun 2019-2023 terjadi pergeseran distribusi PDRB di Sumatera Barat secara perlahan. Distribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2019 sebesar 22,15% selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 sebesar 21,04%. Hal ini dapat dipahami bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian yang tersedia yang sebagian besar beralih fungsi menjadi lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk.

Meskipun sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki distribusi yang cukup besar pada struktur PDRB Sumatera Barat, namun laju pertumbuhannya di tahun 2023 masih relative kecil yakni sekitar 3,54% namun laju ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,52%.

2.1.3.3. Urusan Pilihan

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan di

Sumatera Barat. Dengan posisi geografis Sumatera Barat yang berada di pesisir pantai bagian barat pulau Sumatera memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor ini. Peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Sumatera Barat tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan.

Sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas. Kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan tata ruang untuk mengelola sumber daya alam di laut, telah tertuang dalam Perda 2 tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) tahun 2018-2038 mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km² dengan panjang garis pantai Sumatera Barat yaitu 570,55 Km ditambahkan dengan Kep. Mentawai menjadi 1.973,246 Km dan 185 pulau-pulau kecil. Adapun capaian kinerja dari pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.62
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kelautan Dan Perikanan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP)	467.082	481.143,69	477.362	503.950.37	487.949	479.475,132	499.311	512.013	525.307

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	80	84,34	82	85	84	87	86	90	92
--	----	-------	----	----	----	----	----	----	----

Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT

Besarnya kebutuhan terhadap produksi perikanan tangkap tersebut belum didukung oleh penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS), pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan. armada penangkapan ikan Nelayan yang hingga saat ini masih didominasi oleh kapal berukuran kecil di bawah 10 gros ton (GT), dilihat dari pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 503.950.37ton.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 sebesar 479475,132 ton. Hal ini disebabkan antara lain : 1). Kurangnya bantuan induk unggul, benih dan pakan baik dari APBN dan APBD Provinsi karena merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, 2) Lemahnya penerapan teknologi budidaya, 3). Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan cara berbudidaya ikan yang baik, 4). Masih adanya hama penyakit ikan.

Pencapaian produksi budidaya laut pada tahun 2022 sebesar 649 ton relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 61,43 ton. Tingkat konsumsi ikan di tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan menjadi 43,08 kg/perkapita dibanding tahun 2022 sebanyak 42.52 kg/perkapita, hal ini adalah karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Upaya terus dilakukan untuk

meningkatkan angka konsumsi makan ikan melalui antara lain: mempromasikan hasil–hasil olahan hasil perikanan sumatera barat kepada masyarakat dan kelompok pengolah hasil perikanan, memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan, meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat pengolah. Hal ini juga tak lepas dari adanya kampanye secara masif dan kontinue Gemar makan ikan kepada seluruh elemen masyarakat yang didukung oleh seluruh elemen pemerintah serta masyarakat melalui Forikan. Adapun realisasi capaian tingkat konsumsi ikan tahun 2018-2022 dengan tabel dibawah ini.

Grafik 2.21
Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan di Sumatera Barat
Tahun 2019-2022



Beberapa faktor pendorong yang mendukung dalam pencapaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan antara lain yakni adanya bantuan bidang perikanan tangkap berupa sarana prasarana penangkapan dan bantuan dibidang perikanan budidaya baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, meningkatnya operasional pengawasan serta meningkatnya kesadaran masyarakat memahami peraturan perundangan yang ada.

Namun dalam pencapaian kinerjanya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain kondisi cuaca yang tidak menentu serta kenaikan harga BBM yang turut mempengaruhi meningkatnya biaya operasional dalam kegiatan terutama penangkapan ikan di laut

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB terbesar, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertanian di Sumatera Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya adalah produksi padi sawah dan produktivitas jagung, untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Pada tahun 2023, Pertanian di Sumatera Barat mampu memproduksi padi sebanyak 1.346.063 ton dan jagung dengan produksi sebanyak 921.514 ton .

Pada tahun 2023 capaian produktifitas pertanian per hectare sebesar 9,92 %, sedangkan capaian peningkatan produksi tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar 4,31 %, serta produksi tanaman hortikultura sebesar 9,48 % dan tanaman perkebunan sebesar 1,13 %.

Pada tahun 2023 juga terjadi penurunan kejadian hewan dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 4,71 % dan juga terjadi peningkatan produksi peternakan sebesar 1,51 %. Adapun secara detail capaian untuk urusan Pemerintahan bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	8,42	8,77	8,39	9,85	8,77	9,92	9,12	9,48	9,68
Persentase peningkatan produksi tanaman pangan (%)	2,5	- 2,71	2,6	1,36	2,75	4,81	2,8	2,9	2,95
Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	1,75	9,29	1,75	1,79	1,75	9,48	1,75	1,75	1,75
Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%)	1	3,74	1	-2,8	1	1,13	1	1	1
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0,1	6,94	3,41	26,05	4,71	4,71	4,94	5,19	5,48
Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	1,35	1,83	1,45	1,55	1,51	1,51	1,57	1,62	1,68

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kinerja urusan pertanian antara lain yakni adanya kebijakan alokasi anggaran 10% dari total APBD untuk pelaksanaan Program unggulan terhadap sektor pertanian, adanya penambahan ambahan Benih Padi pada komoditas unggulan, adanya beberapa program peningkatan produktifitas dari Pemerintah, adanya kenaikan harga cabe sehingga menyebabkan tingginya minat petani untuk budidaya cabe, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewannya pada unit pelayanan kesehatan hewan serta ada pendekatan proaktif terhadap masyarakat dan komunitas. Peningkatan kebutuhan/ permintaan daging di masyarakat yang semakin tinggi.

Namun demikian, terdapat juga beberapa hal yang menjadi factor penghambat dalam pencapaian kinerja urusan pertanian antara lain yakni terdapat beberapa Irigasi tersier yang masih rusak mengakibatkan petani kesulitan

memulai tanam, terjadinya kelangkaan pupuk pada beberapa waktu, cuaca ekstrim yang terjadi rentang waktu Triwulan 1 s/d 3, ketersediaan benih Pioneer yang masih langka, adanya eralihan fnksi lahan yang digunakan sebagai pertanaman jagung di alihkan ke komoditi padi setelah adanya perbaikan saluran irigasi, serta turunya Harga komoditi perkebunan sehingga petani tidak bergairah dikarenakan tidak dapat menutupi biaya operasional, rata-rata tanaman yang ada masih berstatus TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) dan diperkirakan akan beralih status menjadi TM (Tanaman Menghasilkan) pada tahun berikutnya, adanya bencana alam pada beberapa Kab/Kota sentra perkebunan contoh : Pasaman dan Pasaman Barat (Gempa Bumi berpusat di sekitaran Gunung Talamau) , Dharmastraya dan Solok Selatan (Banjir Bandang), terbatasnya SDM dilapangan yang terbatas, karena saat ini sedang fokus kepada penanganan wabah PMK, adanya kasus PMK di Sumbar, menyebabkan masih rendahnya produksi daging, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produk hewani.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki peran penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan luas lahan kritis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menahan laju deforestasi dan memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi dengan mencanangkan dan menggalakkan program reboisasi. Melalui program ini ditargetkan berkurangnya lahan-lahan kritis yang tersebar di kabupaten/kota. Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan.

Selain program yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, program peningkatan peran sektor kehutanan sebagai salah satu program unggulan yang masuk dalam sektor pertanian yang mejadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Peningkatan peran sektor kehutanan dilakukan dengan cara memacu produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Peningkatan hasil hutan kayu diarahkan pada hutan rakyat dan hasil hutan bukan kayu melalui peningkatan dan

pengembangan sentra budidaya lebah madu, pemanfaatan jasa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sebagai objek wisata. Selain itu pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan juga menjadi salah satu point penting menjaga kelestarian hutan dan diharapkan masyarakat yang berada di sekitar hutan juga dapat memanfaatkan potensi hutan melalui progam perhutanan sosial guna meningkatkan pendapatan masyarakat/petani sekitar hutan. Beberapa Indikator capaian urusan Pemerintahan bidang seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Kehutanan
Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA								
	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	T	R	T	R	T	R	T	T	T
Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	20	54,72	20	20	20	31,33	20	20	20
Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	0,79	0,48	1,29	0,78	1,79	0,77	2,29	2,79	3,29
Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	1,90	2,55	2,85	2,95	3,81	3,83	4,76	5,71	6,66
Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	20	20	40	40	60	60	80	100	120
Indeks tutupan hutan (Indeks)	61,41	64,20	60,98	63,98	60,55	63,77	60,12	59,69	59,26

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja urusan Kehutanan antara lain yakni adanya antusiasme dan keinginan masyarakat yang cukup besar untuk mendapatkan akses kelola terhadap lahan yang selama ini diakui sebagai ulayat, telah menerapkan Groundcheck untuk akurasi penelaahan citraSentinel 2A dalam identifikasi dan penghitungan kerusakan hutan, telah berjalannya dengan baik Koordinasi dengan pihak terkait yang cukup bagus sehingga mempercepat

proses pelaksanaan tender dan pengadaan bibit, adanya potensi yang telah teridentifikasi dan diminati oleh kelompok cenderung lebih mudah untuk pengembangannya

Beberapa faktor penghambat antara lain yakni pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak, terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan, Luas wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang cukup luas, Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai serta penghitungan Indeks Tutupan hutan masih menggunakan citra sentinel 2A dengan cloud cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan desk analysis.

2.1.5. Aspek-aspek Penting Dalam Peningkatan Daya Saing

2.1.5.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Pada kurun waktu tahun 2018-2023, NTP Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat, yang pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 95,31 dan tahun 2022 dengan capaian 110,39, namun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 110,26.

Tabel 2.81

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2023 Provinsi Sumatera Barat

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks yang diterima petani (It)	125,39	130,55	106,55	108,25	125,42	130,35
2.	Indeks yang dibayar	131,56	136,00	105,92	108,32	113,65	118,20

	petani (lb)						
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	95,31	100,05	100,59	107,59	110,39	110,26

Berdasarkan pembentuknya maka Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan agregasi dari 5 (lima) sub sektor komoditas antara lain yakni :

1. Subsektor Tanaman Pangan terdiri dari padi dan palawija.
2. Subsektor Hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan.
3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat seperti: kelapa, kopi, cengkeh, tembakau, dan sebagainya.
4. Subsektor Peternakan terdiri dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
5. Subsektor Perikanan, meliputi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Jika dilihat lebih rinci maka capaian Nilai Tukar Petani pada masing-masing komoditas pertanian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82
Nilai Tukar Petani dan Sub Sektor Pendukungnya di Sumatera Barat
2018-2022

NTP SUB SEKTOR	TARGET					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani (NTP)	95,31	100,05	100,59	107,59	110,39	110,28
NTP Tanaman Pangan (NTPP)	92,02	94,79	96,06	96,43	97,64	110,16
NTP Hortikultura (NTPH)	82,44	81,45	96,80	99,75	111,81	105,25
NTP Perkebunan Rakyat (NTPR)	99,31	99,73	103,86	126,29	127,72	125,97
NTP Peternakan (NTPT)	103,59	103,86	102,32	101,04	105,33	99,82
NTP Perikanan (NTN)	107,88	107,88	94,55	95,45	96,92	99,06

Berdasarkan data tersebut maka NTP tertinggi pada sub sektor Perkebunan Rakyat dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 110,28 dan Sub Sektor Hortikultura dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 105,25. Jika dilihat dari capaian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Sub Sektor Perkebunan Rakyat, Hortikultura serta Peternakan merupakan sub sektor dengan komoditas yang menguntungkan bagi para petani, namun ada tahun 2023, sub sektor peternakan mengalami penurunan yang signifikan dan digantikan dengan sektor Tanaman Pangan.

Sehingga strategi yang perlu diperkuat pada sektor pertanian dengan alokasi anggaran untuk Sektor Pertanian sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebesar 10% dari total APBD harus diarahkan dan ditajamkan pada seluruh sub sektor tersebut

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1.3. Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 3 yang difokuskan untuk meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui peningkatan pendapatan petani, dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STA TUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan					100%
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	%	5	8.3	100% / Tercapai
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101.19	110.27	100% / Tercapai
3	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	103.98	108.97	100% / Tercapai
4	Pendapatan pembudidaya ikan	Rp. Juta	48590	50989	100% / Tercapai

5	Pendapatan nelayan	Rp. Juta	41611	41758	100% / Tercapai
6	Pendapatan Peternak	Rp. Juta	50265	52458	100% / Tercapai
7	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	%	5	9.94	100% / Tercapai
8	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80.21	83.22	100% / Tercapai
9	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	%	5	17.24	100% / Tercapai

Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan pada Tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan nilai 100%. Dari 9 (sembilan) Indikator kinerja pada prioritas pembangunan 3 yang seluruh dapat mencapai target sebagaimana yang telah di tetapkan. Adapun pencapaian dari masing-masing indicator kinerja yakni sebagai berikut Persentase Peningkatan Pendapatan Petani dengan capaian sebesar 8,3%, Nilai Tukar Petani (NTP) dengan capaian 110,27, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) dengan capaian 108,97, Pendapatan pembudidaya ikan dengan capaian Rp.50,989 juta, Pendapatan nelayan sebesar Rp. 41,758 juta, Pendapatan Peternak dengan capaian sebesar Rp. 52,458 juta, Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura sebesar 9,94%, capaian Indeks Ketahanan Pangan sebesar 83,22 dan Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dengan capaian sebesar 17,24%.

Meskipun secara keseluruhan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 3 telah tercapai namun secara umum dalam pembangunan sektor pertanian dalam artian luas masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar antara lain yakni keterbatasan lahan dan modal yang dimiliki oleh petani, harga jual hasil tani (termasuk ternak) yang cenderung tidak stabil dan akses pasar yang tidak dapat dimasuki langsung oleh petani/peternak terutama ternak unggas, skala usaha atau jumlah kepemilikan ternak belum memenuhi skala ekonomi, usaha perkebunan rakyat masih skala kecil, kenaikan harga barang modal seperti bibit dan pupuk, adanya kelangkaan pupuk bersubsidi, faktor

cuaca yang sangat mempengaruhi hasil pertanian baik kualitas dan harga jual barang, sistem pertanian yang digunakan masih tradisional, adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga mempengaruhi biaya operasional terutama nelayan, pola tanam yang dilakukan tidak sesuai dengan kalender tanam sehingga hasil panen tidak maksimal (terutama untuk komoditas palawija dan hortikultura), serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani/peternak, menurunnya luas panen karena serangan hama dan penyakit terutama pada daerah sentra padi, adanya alih komoditi tanaman pangan ke hortikultura, adanya jaringan irigasi yang masih dalam perbaikan sehingga berpengaruh terhadap waktu tanam, harga komoditi hortikultura yang berfluktuasi, sifat komoditi hortikultura cepat rusak dan tidak dapat disimpan lama, hilirisasi masih belum optimal, harga pakan yang terus meningkat, adanya wabah penyakit seperti PMK untuk sapi dan flu burung untuk unggas, ketersediaan bibit unggul di UPR (Unit Pembenihan Rakyat) masih kurang serta budaya kerja yang masih rendah, masih kurangnya pemahaman pembudidaya dalam melakukan CBIB (Cara budidaya ikan yang baik) dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan kurangnya pemahaman nelayan dalam menerapkan CPIB (cara penanganan ikan yang baik) diatas kapal, masih rendahnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi pertanian, kurangnya akses permodalan bagi pembudidaya ikan dan nelayan.

2.3.2.2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan pemerintahan bidang Pangan

- ✓ Masih terdapatnya daerah rawan pangan
- ✓ Belum kuatnya regulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota
- ✓ Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
- ✓ Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan

- ✓ Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi
- ✓ Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
- ✓ Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui
- ✓ Usaha yang dikelola kelompok belum optimal dan masih berskala rumah tangga
- ✓ Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

2.3.2.3. Urusan Pilihan

A. Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan

- ✓ Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- ✓ Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan
- ✓ Belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terhadap 2 (dua) kawasan
- ✓ Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu karang
- ✓ Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
- ✓ Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
- ✓ Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
- ✓ Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
- ✓ Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.
- ✓ Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir

- ✓ Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil
- ✓ Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
- ✓ Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten
- ✓ Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
- ✓ Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
- ✓ Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km² perairan laut Sumatera Barat
- ✓ Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
- ✓ Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
- ✓ Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
- ✓ Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passenger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional
- ✓ Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
- ✓ Masih belum optimalnya pengolah paska panen dan diversifikasi olahan
- ✓ Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan

B. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

- ✓ Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- ✓ Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- ✓ Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- ✓ Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- ✓ Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- ✓ Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- ✓ Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- ✓ Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- ✓ Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
- ✓ Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
- ✓ Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
- ✓ Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
- ✓ Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sambilan masyarakat
- ✓ Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
- ✓ Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
- ✓ Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun

- ✓ Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
- ✓ Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.
- ✓ Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
- ✓ Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.
- ✓ Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.
- ✓ Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
- ✓ Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

C. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan

- ✓ Masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- ✓ Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- ✓ Masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- ✓ Alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- ✓ Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- ✓ Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).
- ✓ Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- ✓ Pengelolaan DAS belum terpadu

- ✓ Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- ✓ Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local
- ✓ Masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- ✓ Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- ✓ Masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- ✓ Alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- ✓ Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- ✓ Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).
- ✓ Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- ✓ Pengelolaan DAS belum terpadu
- ✓ Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- ✓ Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local
- ✓ Pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak
- ✓ Terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan
- ✓ Luas wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang cukup luas
- ✓ Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai
- ✓ Proses tender bibit yang memerlukan waktu yang agak lama dan standar harga bibit yang belum valid

- ✓ Proses beberapa pengadaan sarana pendukung produksi dan sarpras pendukung masih dalam tahap pengadaan
- ✓ Penghitungan Indeks Tutupan hutan masih menggunakan citra sentinel 2A dengan cloud cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan desk analysis

2.4.2. Permasalahan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun berjalan 2024 hingga triwulan II di Sumatera Barat

- **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

- ✓ Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- ✓ Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan
- ✓ Belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terhadap 2 (dua) Kawasan
- ✓ Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu Karang
- ✓ Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
- ✓ Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
- ✓ Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
- ✓ Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
- ✓ Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.
- ✓ Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir
- ✓ Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil

- ✓ Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
- ✓ Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten
- ✓ Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
- ✓ Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
- ✓ Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km² perairan laut Sumatera Barat
- ✓ Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
- ✓ Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
- ✓ Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
- ✓ Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional
- ✓ Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
- ✓ Masih belum optimalnya pengolahan paska panen dan diversifikasi olahan
- ✓ Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan

- **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

- ✓ Masih terdapatnya daerah rawan pangan
- ✓ Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
- ✓ Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan
- ✓ Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi
- ✓ Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
- ✓ Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui
- ✓ Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

- **Urusan pemerintahan bidang Pertanian**

- ✓ Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- ✓ Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- ✓ Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- ✓ Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- ✓ Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- ✓ Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- ✓ Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- ✓ Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang

- ✓ Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
 - ✓ Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
 - ✓ Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
 - ✓ Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
 - ✓ Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sambilan masyarakat
 - ✓ Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
 - ✓ Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
 - ✓ Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun
 - ✓ Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
 - ✓ Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.
 - ✓ Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
 - ✓ Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.
 - ✓ Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.
 - ✓ Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
 - ✓ Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangansa
- **Urusan pemerintahan bidang Kehutanan**
 - ✓ Masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
 - ✓ Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
 - ✓ Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan

- ✓ Masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- ✓ Alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- ✓ Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- ✓ Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization),
- ✓ Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- ✓ Pengelolaan DAS belum terpadu
- ✓ Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- ✓ Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan serta proyeksi pencapaian indikator makro ekonomi untuk tahun 2025 yang akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023

Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian dunia semakin masih diliputi ketidakpastian sampai dengan akhir tahun 2023. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 telah melambat secara luas. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang semula lebih baik dari perkiraan dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran setelah invasi Rusia ke Ukraina dan konflik genosida di Palestina. Inflasi juga terus menanjak di banyak negara. Kenaikan terutama terjadi pada harga makanan dan energi. IMF menyebut, faktor tersebut membebani pertumbuhan ekonomi dan meredupkan prospek ekonomi ke depan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya mencapai angka 3%. Sementara itu rilis Bank Dunia edisi Desember 2023 memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada tahun 2023. Angka ini relatif lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi hanya mencapai angka 2,1%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 sekitar -1,6% akibat pandemi COVID-19 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir ke angka 0,300 pada tahun 2022 yang lalu dan turun ke angka 0,280 pada tahun 2023. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,388 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik namun tidak serta merta menurunkan ketimpangan wilayah yang sedikit

meningkat ke angka 0,315 dan menjadi 0,319 di tahun 2022. Kondisi ini diprediksi kembali sedikit meningkat ke angka 0,321 di tahun 2023.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, pemulihan ekonomi telah mengurangi jumlah penduduk miskin dari 364,79 ribu jiwa di tahun 2020 menjadi 339,93 ribu jiwa di tahun 2021. Namun kondisi ekonomi global memaksa terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang kembali menambah jumlah penduduk miskin menjadi 343,82 ribu jiwa di tahun 2022. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada tingkat kemiskinan yang sempat berkurang dari 6,04% pada bulan September 2021 menjadi 5,92% di bulan Maret 2022, kembali meningkat ke angka 6,04% di bulan September 2022 namun kembali turun ke angka 5,95% di bulan Maret 2023. Sementara itu walaupun jumlah pengangguran bertambah 158 orang dari tahun 2021 kemudian berkurang sekitar 601 orang menjadi 179.505 orang penganggur di tahun 2023. Angka ini menempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka berkurang dari 6,52% menjadi 6,28% dan turun ke angka 5,94 di tahun 2023.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat Kemiskinan

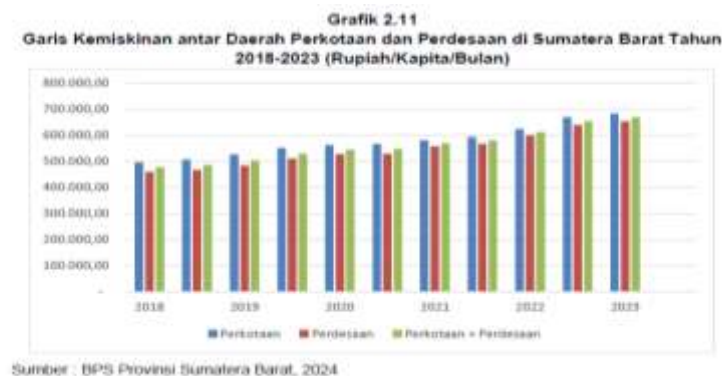
Kemiskinan memiliki definisi dan konsep yang sulit dirumuskan karena memiliki sifat dan penyebab yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi kemiskinan merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan tetapi dalam kenyataannya selalu menjadi permasalahan besar bagi suatu daerah, baik itu pada daerah perkotaan maupun pada daerah perdesaan. Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ialah standar minimum yang diperlukan seseorang dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan dan bukan pangan. Lebih lanjut menurut BPS, masalah kemiskinan dapat berhubungan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti kondisi pendidikan, sosial demografi, perumahan dan ketenagakerjaan. Dengan mengetahui kondisi karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan atau program yang tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.

Ukuran garis kemiskinan antar daerah tempat tinggal baik perkotaan dan perdesaan juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan di Sumatera Barat pada periode Maret dan September serta setiap tahunnya, sebagaimana pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.11

Garis Kemiskinan antar Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan) aimana terlihat pada grafik



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Garis kemiskinan berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, hal ini dipahami karena harga kebutuhan hidup di perkotaan juga lebih tinggi di perdesaan terutama terkait dengan pemenuhan pangan, hal ini mengingat daerah perkotaan pada umumnya tidak berbasiskan pada sektor pertanian,

begitupun juga dengan kebutuhan non pangan untuk di daerah perkotaan seperti biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, biaya transportasi dan komunikasi dan lainnya juga lebih tinggi hal ini karena jumlah penduduk di perkotaan yang lebih padat dibandingkan perdesaan menyebabkan ketersediaan lahan terbatas, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan juga terbatas yang akhirnya menyebabkan biaya tinggi, disamping itu tingkat mobilisasi dan tuntutan pekerjaan di daerah perkotaan yang sangat dinamis menyebabkan banyaknya kebutuhan non pangan lainnya yang harus dipenuhi seperti penyediaan biaya komunikasi, dan transportasi. Kondisi ini tercermin dengan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam indeks Garis Kemiskinan baik di daerah administrasi Kota yang berbasis perkotaan dengan daerah Kabupaten yang pada umumnya didominasi dengan basisnya perdesaan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

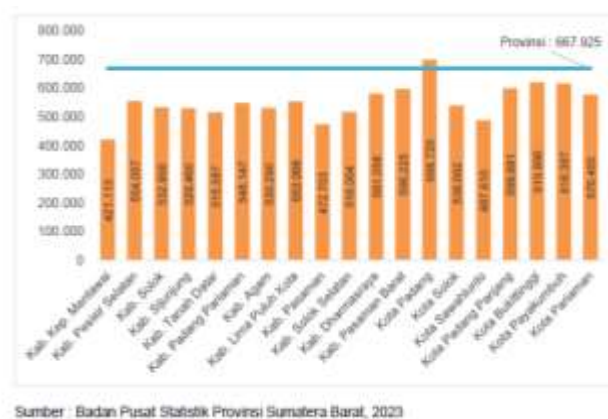
Tabel 2.24
Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	310.033	340.191	356.403	386.152	421.113
2	Kab. Pesisir Selatan	431.817	467.743	491.573	526.564	554.057
3	Kab. Solok	415.649	451.906	461.030	484.358	532.900
4	Kab. Sijunjung	400.861	433.147	455.346	484.572	529.460
5	Kab. Tanah Datar	379.041	420.049	441.793	466.907	515.587
6	Kab. Padang Pariaman	411.182	455.463	475.342	499.461	548.147
7	Kab. Agam	379.304	424.728	444.711	485.222	530.290
8	Kab. Lima Puluh Kota	403.030	451.295	475.123	504.670	553.068
9	Kab. Pasaman	347.153	388.726	408.293	431.915	472.703
10	Kab. Solok Selatan	387.438	419.442	438.187	470.090	516.004
11	Kab. Dharmasraya	439.117	477.421	503.183	530.693	581.058
12	Kab. Pasaman Barat	417.742	467.769	492.467	544.829	596.225
13	Kota Padang	534.857	570.654	602.540	634.581	698.720

14	Kota Solok	440.618	450.254	464.977	491.488	538.682
15	Kota Sawahlunto	374.615	399.688	412.757	443.301	487.610
16	Kota Padang Panjang	450.377	491.142	516.648	543.609	599.681
17	Kota Bukittinggi	475.755	519.470	540.457	570.032	619.896
18	Kota Payakumbuh	482.184	526.490	543.335	573.234	616.357
19	Kota Pariaman	446.514	480.028	495.386	522.932	576.455
	Sumatera Barat	503.652	544.315	568.703	610.941	667.925

Grafik 2.12

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Rata-rata Provinsi Tahun 2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kabupaten/Kota dengan Indeks Garis Kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 hanya berada di Kota Padang. Pada tahun 2023, Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang telah sebesar Rp.698.720 perkapita perbulan. Sedangkan 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota lainnya memiliki Indeks Garis Kemiskinan di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat berada di Kota Padang sehingga indeks garis kemiskinan provinsi sangat dipengaruhi oleh indeks garis kemiskinan yang dibentuk di Kota Padang.

Secara umum, pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada Maret 2019 sebesar 6,42% dan mengalami penurunan terendah menjadi 5,92% pada bulan Maret 2022, namun kembali mengalami peningkatan pada kondisi September 2022 sebesar 6,04% dan 5.95% pada kondisi Maret 2023. Selama kurun tersebut, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat juga dapat diturunkan dari dari 348.22 ribu jiwa (Maret 2019), menjadi 340,37 ribu jiwa (Maret 2023).

Capaian Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selalu berada di bawa rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan nasional pada kondisi Maret tahun 2019 sebesar 9,41%, mengalami kenaikan akibat dampak pandemic covid 19 menjadi 10,19% pada September 2020 namun seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan nasional kondisi Maret tahun 2023 mencapai 9,36%. Adapun perbandingan grafik capaian Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat dan Nasional serta perkembangan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.13
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2019 – September 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Provinsi yang berada di Pulau Sumatera maka capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sejak tahun 2019-2023 relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sejak adanya pandemi Covid 19 di awal Tahun 2020, maka secara signifikan dan merata seluruh capaian tingkat kemiskinan di Provinsi se Sumatera mengalami kenaikan terutama pada kondisi September 2020 dan Maret 2021, dan secara bersamaan juga mengalami penurunan pada capaian Maret 2021 hingga kondisi Maret 2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Barat
Tahun 2019-2023 (Persen)

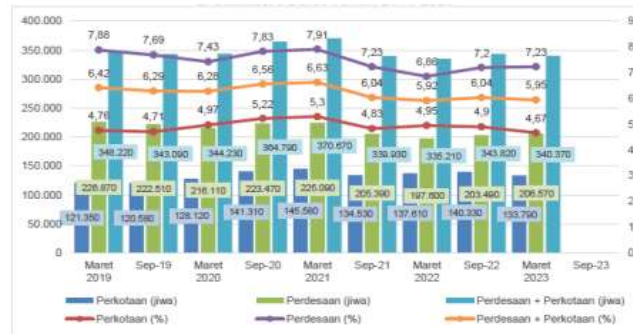
PROVINSI	2019		2020		2021		2022		2023
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
ACEH	15,32	15,01	14,99	15,43	15.33	15.53	14,64	14.75	14,45
SUMATERA UTARA	8,83	8,63	8,75	9,14	9.01	8.49	8,42	8.33	8,15
SUMATERA BARAT	6,42	6,29	6,28	6,56	6.63	6.04	5,92	6.04	5,95
RIAU	7,08	6,90	6,82	7,04	7.12	7.00	6,78	6.84	6,68
JAMBI	7,60	7,51	7,58	7,97	8.09	7.67	7.62	7.70	7,58
SUMATERA SELATAN	12,71	12,56	12,66	12,98	12.84	12.79	11,90	11.95	11,78
BENGKULU	15,23	14,91	15,03	15,30	15.22	14.43	14,62	14.34	14,04
LAMPUNG	12,62	12,30	12,34	12,76	12.62	11.67	11,57	11.44	11,11
KEP. BANGKA BELITUNG	4,62	4,50	4,53	4,89	4.90	4.67	4,45	4.61	11,11
KEP. RIAU	5,90	5,80	5,92	6,13	6.12	5.75	6,24	6.03	5,69
INDONESIA	9,41	9,22	9,78	10,19	10,14	9,71	9.54	9.57	9,36

Jika dirinci berdasarkan karakteristik wilayahnya, penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat lebih besar proporsinya bertempat tinggal di kawasan perdesaan. Data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa rata-rata sekitar dua per tiga penduduk miskin bermukim di kawasan perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena kemiskinan erat kaitannya dengan kawasan perdesaan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 lalu justru lebih banyak berdampak ke peningkatan tingkat kemiskinan di kawasan perkotaan. Tingkat kemiskinan perkotaan naik dari 4,71% di kondisi September tahun 2019 ke angka 5,22% di September tahun 2020 atau naik 0,51% dan mengalami kenaikan kembali pada kondisi Maret 2021 menjadi 5,30% atau naik dibandingkan kondisi September 2020 sebesar 0,08%, sedangkan tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan pada kondisi September 2019 sebesar 7,69% meningkat menjadi 7,83% di September 2020 atau naik sebesar 0,14% dan terus mengalami kenaikan di kondisi Maret 2021 menjadi 7,91%.

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi Covid 19 pada Maret 2020 hingga awal tahun 2021 lebih cenderung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya secara signifikan tingkat kemiskinan di Perkotaan pada kondisi Maret 2022 sebesar 4,95%, begitupun pada daerah Perdesaan juga mengalami penurunan pada kondisi Maret 2022 menjadi 6,86%. Namun pada kondisi September 2023, tingkat kemiskinan di Perdesaan mengalami peningkatan menjadi 7,23% dibandingkan daerah perkotaan justru mengalami penurunan menjadi lebih baik di angka 4,67%.

Grafik 2.14
Jumlah dan Persentase Kemiskinan Menurut Daerah Tempat
di Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam

Tabel 2.26

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN + PERDESAAN
P1			
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
Maret 2022	0,647	0,956	0,804
September 2022	0,782	0,943	0,862
Maret 2023	0,687	0,956	0,821
P2			
Maret 2019	0,196	0,225	0,211

September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,233	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225
Maret 2022	0,131	0,196	0,164
September 2022	0,168	0,180	0,174
Maret 2023	0,154	0,200	0,177

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sepertiga jumlah penduduk miskin berada pada daerah perdesaan yang dominan berada pada wilayah Kabupaten, sedangkan daerah perkotaan cenderung lebih kecil. Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat pada tahun 2023, yaitu sebanyak 41.97 ribu jiwa, kemudian Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 35.09 ribu jiwa dan Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 33.52 ribu jiwa. Meskipun Kota Padang dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Sumatera Barat namun dari tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata Provinsi dengan capaian tahun 2023 sebesar 4,17%. Capaian tingkat kemiskinan paling tinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13.76%. Adapun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27

Jumlah penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)

Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)

No	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	13,22	13,37	14,31	13,74	13,76
2	Kab. Pesisir Selatan	36,51	35,46	37,41	33,78	35,09
3	Kab. Solok	29,74	29,28	30,36	27,16	27,33
4	Kab. Sijunjung	16,65	16,28	16,81	15,07	15,02
5	Kab. Tanah Datar	16,20	15,34	15,89	14,91	14,56
6	Kab. Padang Pariaman	29,48	28,98	30,41	26,44	26,93

7	Kab. Agam	33,10	33,31	34,26	31,33	33,41
8	Kab. Lima Puluh Kota	26,64	26,43	28,51	26,00	27,02
9	Kab. Pasaman	20,22	20,29	21,57	19,94	19,99
10	Kab. Solok Selatan	12,49	12,39	13,41	11,81	11,91
11	Kab. Dharmasraya	15,49	15,70	17,60	15,08	15,49
12	Kab. Pasaman Barat	31,53	31,64	34,97	32,91	33,52
13	Kota Padang	42,44	42,17	48,44	42,37	41,97
14	Kota Solok	2,29	1,99	2,31	2,28	2,35
15	Kota Sawahlunto	1,35	1,36	1,52	1,47	1,47
16	Kota Padang Panjang	3,00	2,84	3,28	2,89	2,98
17	Kota Bukittinggi	6,00	6,01	6,98	6,16	5,78
18	Kota Payakumbuh	7,68	7,74	8,66	8,08	7,88
19	Kota Pariaman	4,20	3,66	3,99	3,80	3,91
	Sumatera Barat	348,22	344,23	370,67	335,21	340,37

Tabel 2.28

Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat (%)

Tahun 2019-2023 (Kondisi Maret)

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	14,43	14,35	14,84	13,97	13,72
2	Kab. Pesisir Selatan	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
3	Kab. Solok	7,98	7,81	8,01	7,12	7,13
4	Kab. Sijunjung	7,04	6,78	6,80	6,00	5,88
5	Kab. Tanah Datar	4,66	4,40	4,54	4,26	4,16
6	Kab. Padang Pariaman	7,10	6,95	7,22	6,25	6,34
7	Kab. Agam	6,75	6,75	6,85	6,22	6,60
8	Kab. Lima Puluh Kota	6,97	6,86	7,29	6,59	6,80
9	Kab. Pasaman	7,21	7,16	7,48	6,85	6,80
10	Kab. Solok Selatan	7,33	7,15	7,52	6,51	6,45
11	Kab. Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56
12	Kab. Pasaman Barat	7,14	7,04	7,51	6,93	6,92
13	Kota Padang	4,48	4,40	4,94	4,26	4,17
14	Kota Solok	3,24	2,77	3,12	3,02	3,05

15	Kota Sawahlunto	2,17	2,16	2,38	2,28	2,27
16	Kota Padang Panjang	5,60	5,24	5,92	5,14	5,24
17	Kota Bukittinggi	4,60	4,54	5,14	4,46	4,11
18	Kota Payakumbuh	5,68	5,65	6,16	5,66	5,44
19	Kota Pariaman	4,76	4,10	4,38	4,13	4,20
	Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,93
	Nasional	9,22	10,19	10,14	9,57	9,36

6. Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 Lingkup SDA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik.

Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Indeks ini memiliki skala nol sampai satu. Nilai nol menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat buruk, sedangkan nilai satu menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas oleh

pemerintah daerah. Perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah didasarkan pada pengurangan ancaman dan pemanfaatan berkelanjutan dari sektor hutan dan lahan, pertanian dan perkebunan, perairan air laut dan air tawar.

Terkait keanekaragaman hayati, wilayah Sumatera Barat memiliki iklim sub tropis basah sehingga terdapat banyak flora dan fauna sebagai sumber keanekaragaman hayati. Sumatera Barat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, berdasarkan data yang hanya tersedia pada tahun 2019, maka untuk jenis liar yang belum diketahui nilai ekonominya tercatat sebanyak 551 jenis tumbuhan liar daratan dan perairan serta 107 jenis ikan air tawar, 155 jenis ikan air laut, 33 jenis amfibi, 42 jenis reptil, 295 jenis burung, dan 129 mamalia. Untuk jenis liar yang telah diketahui nilai ekonominya tercatat sebanyak 101 jenis tumbuhan liar daratan dan perairan serta 22 jenis burung, 59 jenis ikan laut dan 16 jenis ikan air tawar. Keanekaragaman hayati terjadi pada tingkat genetik, tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman hayati yang diukur dari jumlah total variasi genetik dari keseluruhan jenis organisme.

Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman makhluk hidup/ organisme yang dari kekayaan spesies. Sedangkan kekayaan ekosistem adalah berkaitan dengan dengan keragaman habitat/ekosistem meliputi komunitas makhluk hidup dan proses ekologi di lingkungan biosfer. Kondisi Keanekaragaman hayati ekosistem dan spesies terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-1
Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem dan Spesies Sumatera Barat
Tahun 2019

No	Keanekaragaman Hayati	Jumlah Ekosistem
1	Danau	5 buah
2	Karst	17 lokasi
3	Sawah Irigasi	186.550 Ha
4	Pulau Kecil	219 buah

5	Terumbu Karang	39.619,42 Ha
6	Mangrove	19.570,81 Ha
7	Padang Lamun	598,85 Ha
Spesies (Belum diketahui nilai Ekonominya)		
1	Jenis tumbuhan liar	551 Jenis
2	Amfibi	33 ekor
3	Reptil	42 ekor
4	Burung	295 ekor
5	Mamalia	129 ekor
6	Tumbuhan liar di perairan	40 jenis
7	Ikan Air Tawar	107 ekor
8	Ikan Air Laut	155 ekor
9	Kerang	235 ekor
Spesies (Sudah diketahui nilai Ekonominya)		
1	Jenis Tumbuhan Liar	91 jenis
2	Satwa liar daratan	22 ekor
3	Tumbuhan liar perairan	10 jenis
4	Satwa liar laut	59 ekor
5	Satwa liar air tawar	16 ekor
Jenis Yang Sudah Dibudidayakan		
1	Tanaman pangan	40 jenis
2	Tanaman Perkebunan	25 jenis
3	Tanaman Hortikultura	207 jenis
4	Pakan ternak	9 jenis
5	Obat dan Rempah	111 jenis
6	Tumbuhan untuk industri dan kehutanan	23 jenis
7	Hewan Ternak yang diperlihara	10 ekor
8	Ikan air laut yang dibudidayakan	3 jenis
9	Ikan air tawar yang dibudidayakan	11 jenis
10	Tumbuhan liar iwasif	56 jenis

Pengelolaan kekayaan hayati ini akan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan orang-orang di Sumatera Barat. Namun demikian, pemanfaatan keanekaragaman hayati perlu mempertimbangkan aspek berkelanjutan sehingga tidak menyebabkan kerusakan sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terkait hal ini, Sumatera Barat telah memiliki tujuh Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang bertujuan menjaga ekosistem laut dan daratnya. Pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan dengan sistem zonasi yang meliputi zona inti dan zona pemanfaatan seperti pada Taman Perairan di Wilayah Kota Pariaman. Langkah-langkah nyata telah diimplementasikan, seperti perlindungan terumbu karang, rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan terhadap spesies seperti penyu. Dalam hal ini, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat dinilai dalam kategori optimum dengan nilai 61,5% oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam perspektif yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui berbagai program berbasis ekosistem. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Dengan upaya-upaya ini, Sumatera Barat berusaha memastikan kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian penting dari strategi pengelolaan sumber daya alamnya.

b. Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Undernourishment berbeda dengan malnutrition dan undernutrition,

dimana malnutrition dan undernutrition adalah outcome terkait status gizi. Walaupun undernourishment adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami undernourished (ketidacukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui situasi pangan dan gizi suatu wilayah.

Tabel II-2
Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2022

Provinsi	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NASIONAL	8.23	7.92	7.63	8.34	8.49	10.21	
SUMATERA BARAT	5.53	5.45	4.9	5.86	6.02	7.31	7.63

Secara umum, capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilainya mencapai 7,63 % yang berarti bahwa proporsi penduduk di Sumatera Barat yang mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif hanya sebesar 7,63 % dari seluruh jumlah penduduk atau dalam kategori sedang. Terdapat 5 (lima) klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Tingkat Kemiskinan

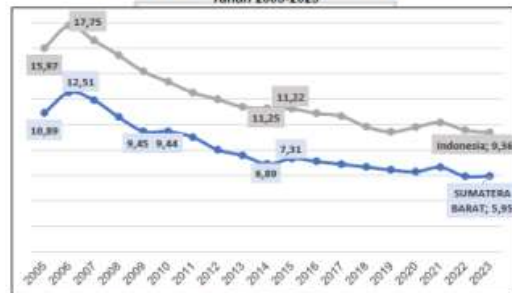
Provinsi Sumatera Barat dalam dua dekade terakhir memiliki tingkat kemiskinan (p0) relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan peringkat ketiga terendah di Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Data BPS Tahun 2023 mencatat bahwa 20% penduduk Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap kemiskinan. Sebagai contoh, dengan Garis Kemiskinan (GK) Rp. 348.000- pada 2009, memperlihatkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebesar 6,4%. Jika GK tersebut digeser menjadi 1,5 kali lipat (Rp. 680 ribu) pada tahun yang sama, maka persentase kemiskinan tahun 2019 melonjak menjadi 12,54%. Jika garis kemiskinan digeser menjadi 1,7 kali lipat (Rp. 1,1 juta) maka tingkat kemiskinan menjadi 20,27%.



Insiden kemiskinan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, penduduk yang bekerja di sektor pertanian memiliki insiden kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 60,1% (BPS 2020) dimana distribusi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 35,3% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin yang ada di sektor pekerjaan tersebut yang tertinggi adalah pertanian tanaman padi, palawija dan palawija (29,1%), Perkebunan (15%), dan pertanian hortikultura sebesar 8,7% (TNP2K, 2021 dan BPS (2020). Selanjutnya, kepemilikan aset penduduk miskin di Sumatera Barat menunjukkan kepemilikan relatif baik di masing-masing kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Kepemilikan aset dapat dijadikan sebagai potensi pendukung sumber daya yang dapat mengurangi kemiskinan di masa datang. Secara umum. Penduduk miskin yang ada memiliki aset lahan/tanah 42,2%, aset kendaraan roda dua lebih setengah dari masyarakat miskin (52,2%), dan kepemilikan aset lemari es/kulkas sebanyak 23%.

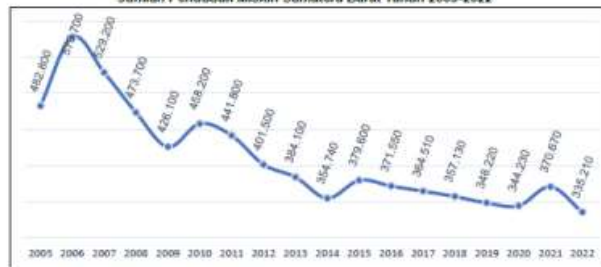
Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada kurun waktu tahun 2005-2022 menunjukkan tren yang semakin menurun dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 10,89% atau 482.800 jiwa pada tahun 2006 menjadi 5,92% atau 335.210 jiwa pada tahun 2022. Hal ini disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II-13
Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar II-14
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selama sejak 2005 memiliki sejumlah tantangan. Pada awal pelaksanaan RPJPD, pada tahun 2006 sebagaimana keadaan nasional, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat meningkat dari 10,89 persen menjadi 12,51 persen mengikuti besaran kenaikan tingkat kemiskinan nasional yang meningkat dari 15,97 menjadi 17,75 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2016 ini dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak akibat pengurangan subsidi sehingga berimpas pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat dihadapkan pada dampak dari bencana alam gempa bumi pada 20 September 2009. Dampaknya, tingkat kemiskinan stagnan pada tahun 2010 sebesar 5,44 persen dibandingkan 5,45 persen pada tahun 2009. Setelah tingkat kemiskinan menurun pada 2011 hingga 2014, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat meningkat pada tahun 2015 menjadi 7,32 persen dari 6,89 persen pada tahun 2014. Pada saat bersamaan, angka nasional mengalami penurunan sangat tipis dari 11,25 menjadi

11,22. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu inflasi terutama kenaikan harga bahan pokok dan perlambatan ekonomi global. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Barat lebih rentan dan terdampak lebih besar dibandingkan nasional terkait kenaikan harga bahan bakar maupun kenaikan harga bahan pokok.

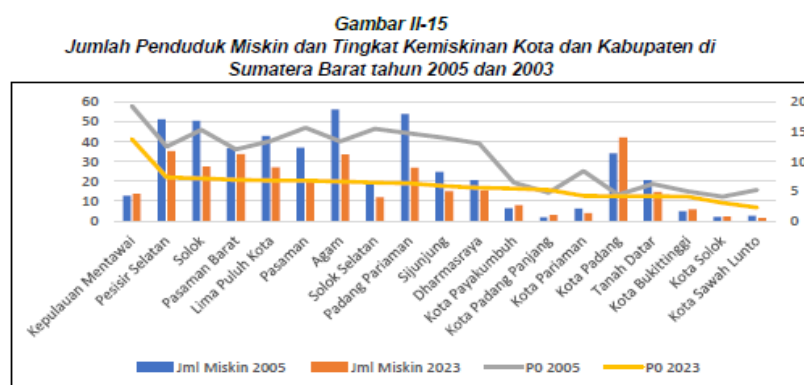
Kondisi penting terakhir yang memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada Maret 2020. Menariknya, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tetap menurun pada tahun 2020 dari 6,42 persen menjadi 6,28 persen. Peningkatan tingkat kemiskinan terjadi justru pada tahun 2021 menjadi 6,63 persen. Pada saat bersamaan, tingkat kemiskinan nasional telah meningkat dari 9,41 persen pada tahun 2019 menjadi 9,78 dan 10,14 persen pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat relatif memiliki resiliensi (ketahanan) dan mitigasi pandemi terhadap penduduk miskin yang lebih baik dibandingkan kondisi nasional. Namun demikian, risiko pembangunan khususnya dalam pengentasan kemiskinan mensyaratkan pengelolaan risiko yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketahanan dalam menghadapi pandemi maupun bencana alam, yang bisa diiringi oleh gejolak ekonomi dari kebijakan terhadap harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi global.

Kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan pada daerah-daerah di Sumatera Barat. Sebaran penduduk miskin di Sumatera Barat selama 2005-2023 menunjukkan terjadinya perubahan konsentrasi penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 482,8 ribu jiwa dengan tiga daerah terbanyak penduduk miskin, yaitu Agam (56,0 ribu jiwa), Padang Pariaman (53,7 ribu jiwa), dan Pesisir Selatan (51,1 ribu jiwa). Dengan demikian, sepertiga jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berada pada tiga daerah ini. Pada tahun 2023, terjadi pergeseran konsentrasi penduduk miskin menurut daerah. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 340,37 ribu jiwa, telah diidentifikasi tiga daerah dengan penduduk miskin terbanyak, yaitu Kota Padang (41,97 ribu

jiwa), Pesisir Selatan (35,09 ribu jiwa), dan Pasaman Barat (33,52 ribu jiwa). Dalam hal ini, Kota Padang menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Gambaran daerah dalam indikator jumlah penduduk miskin daerah menunjukkan perbedaan dengan indikator tingkat kemiskinan. Pada tahun 2005, tingkat kemiskinan pada daerah administratif kabupaten mencatatkan angka melebihi 10 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi selama kurun waktu 2005 ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai 19,25. Angka dengan jarak yang jauh dibandingkan yang tingkat kemiskinan terendah di Kota Padang yang hanya 4,41 persen. Tingkat kemiskinan daerah berstatus kabupaten telah berada di bawah 10 bahkan 8 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13,72 persen. Gambaran ringkas dan rinci tingkat kemiskinan di daerah ini disajikan pada Gambar dan tabel berikut ini.

Perbandingan antara tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tingkat daerah ini menggambarkan tantangan baru dan relevan untuk masa depan dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. Pertama, perubahan konsentrasi penduduk miskin yang awalnya ditempati Agam dan Padang Pariaman menjadi Padang dan Pesisir Selatan yang memperlihatkan keragaman yang tinggi antar daerah. Hal ini memerlukan pemahaman terhadap keunikan karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi pengurangan jumlah penduduk miskin pada masing-masing daerah, termasuk migrasi tenaga kerja, kondisi geografis yang memengaruhi kehidupan masyarakat miskin.



Tabel II-8

Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)																	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SUMATERA BARAT (Provinsi)	482.80	578.70	529.20	473.70	426.10	458.20	441.80	401.50	384.10	354.74	379.60	371.55	364.51	357.13	348.22	344.23	370.67	335.21
Kepulauan Mentawai	12.70	11.10	10.00	14.70	13.20	15.10	14.60	13.40	13.30	12.58	13.16	13.09	12.95	12.99	13.22	13.37	14.31	13.74
Pesisir Selatan	51.10	63.30	54.60	47.30	44.30	44.00	42.40	38.70	38.30	35.02	38.13	35.86	35.53	34.92	36.51	35.46	37.41	33.78
Kab. Solok	50.30	62.30	58.50	45.00	40.80	41.00	39.50	35.70	36.90	34.48	36.42	34.06	33.33	32.89	29.74	29.28	30.36	27.16
Sijunjung	24.80	30.70	28.80	21.90	19.00	21.10	20.30	18.60	18.40	17.00	17.52	17.12	16.83	16.55	16.65	16.28	16.81	15.07
Tanah Datar	20.50	25.40	24.60	23.80	21.80	23.40	22.60	20.40	19.80	18.22	20.05	19.63	19.27	18.48	16.20	15.34	15.89	14.91
Padang Pariaman	53.70	66.50	62.50	51.50	45.20	46.30	44.80	40.40	36.80	33.92	35.87	36.34	34.70	33.20	29.48	28.98	30.41	26.44
Agam	56.00	59.40	51.10	45.30	39.70	44.90	43.30	39.30	36.10	33.28	36.06	37.55	36.57	32.92	33.10	33.31	34.76	31.33
Lima Puluh Kota	42.70	52.90	46.10	34.40	31.10	36.50	35.20	31.90	30.00	27.42	28.76	28.57	26.93	26.47	26.64	26.43	28.51	26.00
Pasaman	36.80	45.60	42.80	35.00	30.50	27.80	26.80	24.30	22.20	20.33	21.88	20.83	20.38	20.31	20.22	20.29	21.57	19.94
Solok Selatan	18.30	22.70	21.30	16.70	14.60	16.10	15.50	14.20	12.60	11.56	11.95	11.91	11.89	11.85	12.49	12.39	13.41	11.81
Dharmasraya	20.50	25.40	23.80	21.40	19.90	20.30	19.60	18.20	16.40	15.22	15.89	16.24	15.63	15.42	15.49	15.70	17.60	15.08
Pasaman Barat	36.70	45.50	42.70	34.40	30.40	35.10	33.80	31.10	31.10	28.59	32.34	30.76	30.84	31.83	31.53	31.64	34.97	32.91
Padang	34.00	42.10	39.50	51.70	46.80	52.80	50.90	45.90	44.20	40.70	44.43	42.56	43.75	44.04	42.44	42.17	48.44	42.37
Kota Solok	2.20	2.70	2.50	4.00	3.80	4.20	4.00	3.70	2.90	2.71	2.72	2.59	2.50	2.29	2.29	1.99	2.31	2.28
Sawahlunto	2.70	1.50	1.10	1.00	1.20	1.40	1.40	1.30	1.40	1.34	1.34	1.34	1.23	1.48	1.35	1.36	1.52	1.47
Padang Panjang	2.00	2.50	2.60	4.20	4.00	3.60	3.50	3.20	3.30	3.23	3.44	3.47	3.22	3.11	3.00	2.84	3.28	2.89
Bukittinggi	5.00	5.30	5.20	7.20	6.20	7.60	7.30	6.70	6.40	6.00	6.54	6.81	6.75	6.32	6.00	6.01	6.98	6.16
Payakumbuh	6.60	8.20	7.70	10.90	10.10	12.40	12.00	11.00	9.70	8.85	8.51	8.35	7.72	7.69	7.68	7.74	8.66	8.08
Pariaman	6.20	5.50	3.90	3.50	3.60	4.70	4.50	4.10	4.40	4.30	4.58	4.47	4.40	4.40	4.20	3.66	3.99	3.80

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kedua, Kota Padang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, tetapi dari segi jumlah, Padang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, tetapi dengan jumlah penduduk miskin yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya. Pada saat bersamaan, terdapat daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk yang juga besar yang tersebar, diantaranya Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Agam, dan Kabupaten Solok. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus mencermati secara proporsional antara upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ini.

Ketiga, pentingnya memperhatikan karakteristik kemiskinan berbasis kondisi lokal. Perbedaan karakteristik kemiskinan perkotaan di Kota Padang berbeda dari daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun daerah pesisir seperti Pesisir Selatan dan daerah pertanian seperti Agam dan Kabupaten Solok. Secara khusus, karakteristik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan dan terdepan memerlukan perhatian dan pendekatan khusus dalam program-program afirmasi multisektor dalam penanggulangan kemiskinan. Pada saat bersamaan, meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang memerlukan perhatian terhadap konsentrasi serta karakteristik kemiskinan perkotaan. Begitupun dalam

pengentasan kemiskinan di Pesisir Selatan sebagai daerah Pesisir; dan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat maupun Kota Solok sebagai daerah pertanian.

Gambar II-16
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



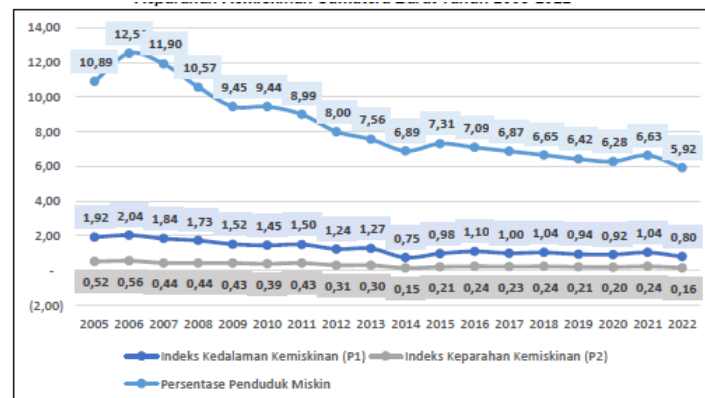
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan data sebaran kemiskinan di atas, tingginya persentase penduduk miskin tidak secara langsung dapat menggambarkan kemiskinan pada wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini karena data tersebut merupakan konsentrasi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan demikian, persentase kemiskinan yang tinggi belum tentu memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi di wilayah tersebut. Hal ini memerlukan kesesuaian kebijakan intervensi terhadap penanganan kemiskinan pada masing-masing wilayah.

Dalam upaya memahami secara mendalam tentang kondisi kemiskinan bagi perencanaan dan kebijakan pembangunan, indikator tingkat kemiskinan atau kemiskinan per kepala (P0) dilengkapi pula dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengukur rata-rata jarak atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Sumatera Barat mengalami penurunan yang berarti sejak 2005, yaitu 1,92 menjadi 0,82 pada 2023. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 1,53 pada tahun 2023. Adapun angka terendah pada tahun 2023 dicatatkan oleh Kota Sawahlunto dengan indeks kedalaman kemiskinan hanya 0,17. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus karena masih tingginya indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai 1,98 pada tahun 2023 yang lebih dari dua kali daripada angka provinsi dan di atas angka nasional.

Indeks keparahan kemiskinan yang menilai penyebaran atau ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang signifikan selama 2005-2023. Angkanya menurun dari 0,52 menjadi 0,18 atau sebesar 65 persen dibandingkan nasional yang menurun 0,78 menjadi 0,38 atau sekitar 51 persen. Kondisi keparahan kemiskinan pada tingkat daerah sejalan dengan kedalaman dan tingkat kemiskinan. Keparahannya tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai diikuti oleh Kabupaten Solok Selatan dengan angka masing-masing 0,48 dan 0,28, sedangkan yang terendah bahkan mendekati 0 yang mencerminkan meratanya pendapatan diantara penduduk miskin, yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Solok, yaitu dengan nilai indeks 0,02. Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan ini disajikan pada grafik di bawah.

Gambar II-17
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan
Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Indikator kemiskinan penting lainnya adalah tingkat kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal yang membedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Indikator ini untuk memperhatikan aspek wilayah dalam kemiskinan. Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada tantangan tingginya kemiskinan di perdesaan daripada perkotaan. Pada Maret 2012, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 9,14 persen dibandingkan 6,67 persen untuk perkotaan. Meskipun telah menurun pada Maret 2023 menjadi 4,67 persen di perkotaan dan 7,23 persen di perdesaan, namun selisih tingkat kemiskinan antara perkotaan dengan perdesaan tidak berubah, dan bahkan sedikit meningkat. Selanjutnya, dalam hal kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat, kondisinya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem turut mengalami penurunan dari 0,77% menjadi 0,41% pada tahun 2023. Meskipun menurun, masih dibutuhkan sinergi dan upaya yang lebih masif melalui efektifitas kebijakan dan intervensi dan pemanfaatan data dalam upaya pemenuhan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.

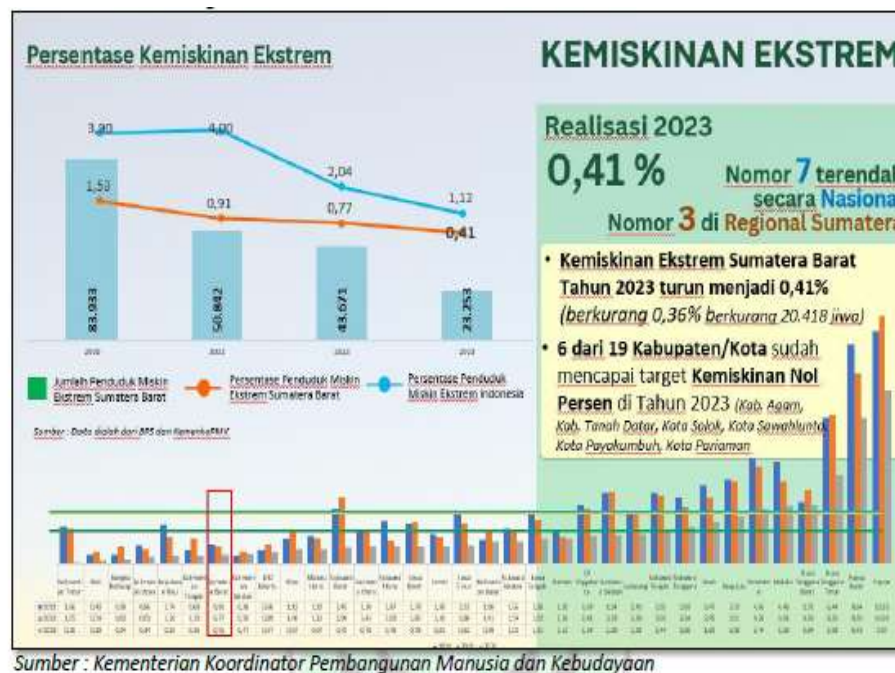
b. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti

makanan, air bersih, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kondisi ini sering diukur berdasarkan pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari (dalam nilai dolar AS 2011). Faktor penyebab kemiskinan ekstrem diantaranya adalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta perubahan iklim dan bencana alam. Dengan demikian, upaya pencegahan terjadinya kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan utuh dan menyeluruh sehingga mereka yang berada dan berpotensi mengalami kemiskinan ekstrem bisa keluar dari situasi tersebut.

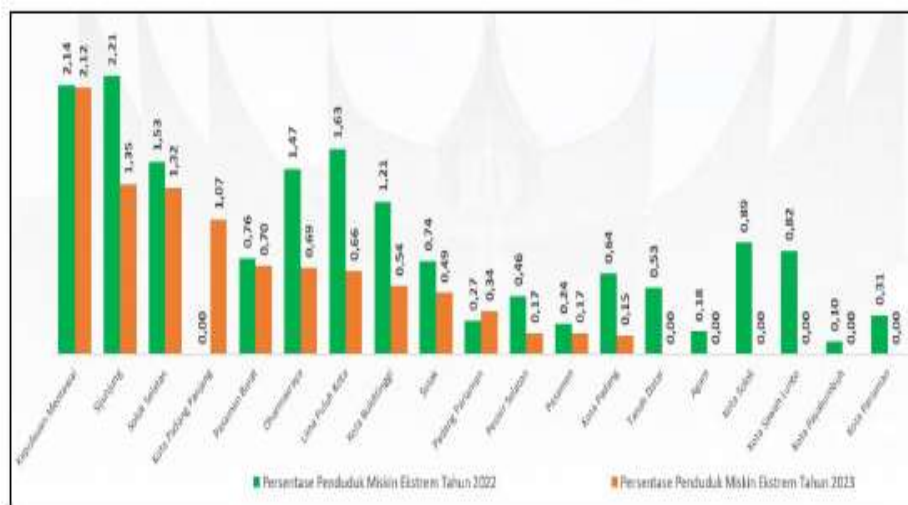
Kondisi kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat pada tahun 2023 berada pada angka 0,41% atau 23.253 jiwa. Angka kemiskinan ekstrem Sumatera Barat berada pada urutan 7 dari 38 provinsi secara nasional atau nomor 3 terendah di Pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II-18
Perkembangan Persentase Kemiskinan Eksrem di Sumareea Barat
Tahun 2023



Kondisi kemiskinan ekstrem pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat setiap tahun mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2023, terdapat enam kabupaten dan kota yang sudah mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Sawalunto dan Kota Pariaman kemudian sebelas kabupaten dan kota menurun dan hanya Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang yang mengalami kenaikan.

Gambar II-19
Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat Tahun 2022 – 2023



Sumber : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2.3. Aspek Daya Saing

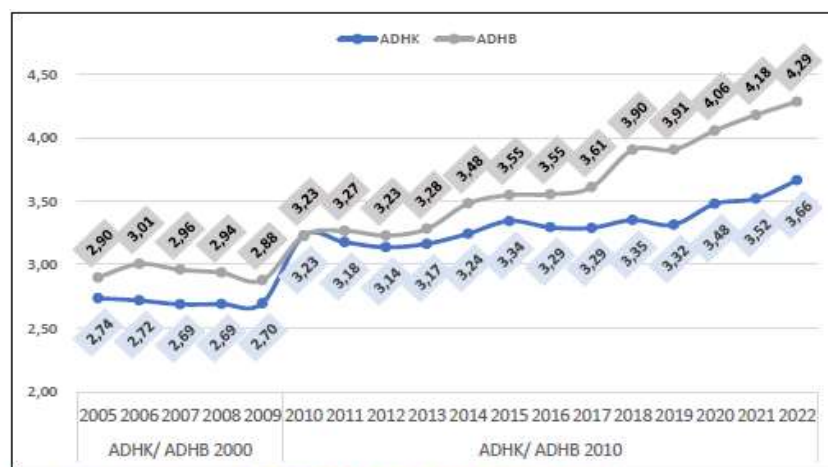
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Ekonomi biru dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia. Sektor ini berkaitan erat dengan perikanan yang disusun oleh dua komponen, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Data yang dihasilkan menunjukkan kondisi bahwa semakin tinggi persentase

sektor perikanan dalam struktur PDRB, maka semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Sumatera Barat. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Indonesia. Secara umum, PDRB Sub Sektor Perikanan (%) di Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu tahun 2005-2022 memiliki laju pertumbuhan yang cukup berfluktuatif. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tetap tumbuh positif setiap tahunnya meski pada periode tahun 2019-2020 Indonesia dan dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar II-50
Distribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan nilai distribusi subsektor perikanan tersebut terus mengalami peningkatan baik dari sisi harga berlaku ataupun harga konstan. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), distribusi subsektor perikanan terus tumbuh dari 2,74% pada tahun 2005 menjadi 3,66% pada tahun 2022. Sementara, berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, nilai distribusinya juga terus tumbuh dengan nilai distribusi sebesar 2,90% pada tahun 2005 menjadi 4,29% pada tahun 2022. Kondisi ini sekaligus menggambarkan kondisi potensi subsektor perikanan yang terus berkembang setiap tahunnya yang ditandai dengan meningkatnya nilai distribusi terhadap PDRB Sumatera Barat.

Untuk mengukur perkembangan ekonomi biru, pada tahun 2023 lalu telah diluncurkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan ekonomi biru. Penghitungan Indeks Ekonomi Biru Indonesia/ Indonesia Blue Economy Index (IBEI) hingga saat ini masih berada pada tahapan pengembangan, sehingga data yang tersedia masih terbatas pada tahun 2022 dan 2023. Nilai tersebut mencirikan kondisi sejauh mana pemanfaatan sumber daya laut telah berdampak pada ekonomi negara. Pada level nasional, nilai Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 43,98, nilai tersebut meningkat dari tahun 2022 yang mencapai angka 41,28. Kondisi tersebut didukung oleh kondisi pilar sosial sebesar 53,22, pilar lingkungan sebesar 28,94, pilar ekonomi sebesar 20,15. Kontribusi tertinggi pada pilar sosial utamanya berasal dari sub-sektor kesehatan khususnya konsumsi protein dan ikan. Hal ini sebagaimana disajikan data rincian pilar dan sub pilar penyusun Indeks Ekonomi Biru pada tabel di bawah.

Tabel II-14
Perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Nasional
Tahun 2022-2023

Pillar/Sub-Pillar	IBEI 2022	IBEI 2023
Economic: Capture Fisheries and Aquaculture	9,84	9,59
Economic: Marine-based Manufacturing	20,07	21,57
Economic: Trade, Transportation and Logistics	10,09	11,92
Economic: Marine-based Tourism	25,22	26,32
Economic: Enabler: Technology	6,13	6,40
Economic: Enabler: Governance	14,80	15,45
Environment: Marine Resources and Conservation Quality	26,80	26,39
Environment: Ocean Renewable Energy	13,00	10,99
Social: Welfare	26,05	26,20
Pillar/Sub-Pillar	IBEI 2022	IBEI 2023
Social: Education	21,15	22,08
Social: Health	61,32	62,85

Pillar: Economic	18,47	20,15
Pillar: Environment	30,98	28,94
Pillar: Social	52,35	53,22
Average IBEI	41,28	43,98

Pada level provinsi, nilai tertinggi Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai indeks pada tahun 2023 sebesar 80,86. Sementara Provinsi Sumatera Barat berada pada Peringkat 25 dengan nilai indeks 29,73 naik dari tahun 2022 yang memiliki nilai indeks 26,29. Berikut disajikan data perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Provinsi di Indonesia pada Tahun 2022-2023.

Tabel II-15
Perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Provinsi
Tahun 2022-2023

Peringkat 2023	Provinsi	Indeks Ekonomi Biru		Pilar Ekonomi Biru 2023		
		2022	2023	Ekonomi	Lingkungan	Sosial
1	Sulawesi Selatan	78,59	80,86	52,00	50,20	85,50
2	Jawa Timur	73,52	71,63	74,30	39,40	51,80
3	Nusa Tenggara Timur	69,81	68,50	36,60	70,10	47,10
4	Sulawesi Utara	42,73	67,98	23,00	61,10	71,10
5	Maluku	72,59	67,22	31,60	52,00	71,00
6	Jawa Tengah	58,84	65,30	52,70	48,00	48,70
7	Nusa Tenggara Barat	46,63	61,83	22,90	67,00	48,80
8	Sulawesi Tenggara	60,19	60,57	28,10	40,30	72,40
9	Sulawesi Tengah	50,16	59,87	30,20	49,90	56,80
10	Sumatera Utara	50,12	58,77	24,00	47,00	64,20
11	Papua Barat	50,47	57,85	9,60	58,20	63,70
12	Aceh	46,50	55,01	32,70	27,70	68,80
13	Jawa Barat	49,44	54,65	38,40	39,20	47,90
14	Maluku Utara	50,40	54,57	11,80	39,00	76,30
15	Gorontalo	44,85	47,55	8,20	47,60	52,30
16	Kepulauan Riau	42,52	45,49	25,20	26,20	55,00

17	Kalimantan Barat	41,94	39,54	12,40	27,70	52,00
18	Kalimantan Timur	33,46	37,33	11,90	18,80	57,70
19	Riau	27,09	32,87	10,70	15,40	52,00
20	Bengkulu	34,79	31,47	8,50	23,10	41,40
21	Kep. Bangka Belitung	29,17	31,27	9,70	10,00	55,70
22	Sulawesi Barat	33,77	31,23	5,90	10,50	58,90
23	Kalimantan Utara	34,19	30,66	8,50	6,30	59,80
24	Bali	33,84	30,28	28,30	13,20	29,30
25	Sumatera Barat	26,29	29,73	8,10	16,40	45,80
26	Papua	34,27	29,68	11,50	21,80	35,40
27	Banten	30,90	29,05	17,20	6,60	46,10
28	Kalimantan Selatan	26,64	28,97	9,90	9,50	50,30
29	Kalimantan Tengah	24,79	27,75	4,10	10,80	51,80
30	Lampung	33,97	27,65	11,20	16,20	37,50
31	DKI Jakarta	27,59	26,90	16,60	2,00	47,00
32	Sumatera Selatan	17,44	23,83	2,40	9,40	45,60
33	Jambi	15,35	18,01	0,90	1,50	42,20
34	DI Yogyakarta	10,67	11,47	6,10	2,00	19,70

Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, permodalan dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau didesain sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara nyata, representatif, dan akurat. Berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2021 diperoleh hasil bahwa secara nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 7 dengan nilai rata-rata 54,75 (kategori Baik Tier 1) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66%.

Secara umum, kondisi ekonomi biru di wilayah Sumatera Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan: Kesehatan ekosistem pesisir dan laut, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yang memengaruhi kontribusi ekonomi biru.
2. Infrastruktur perikanan: Ketersediaan dan kondisi infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan, dermaga, pabrik es, kapal, alat tangkap ikan dan fasilitas pendukung lainnya yang memengaruhi daya saing dan pertumbuhan sektor ekonomi biru.
3. Pariwisata bahari: Kontribusi pariwisata bahari terhadap ekonomi biru yang dipengaruhi oleh pertumbuhan kunjungan, manajemen keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
4. Lalu lintas bongkar muat barang ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri di Pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan lainnya di Sumatera Barat.
5. Kesejahteraan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh ketersediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
6. Pengurangan pencemaran laut termasuk limbah plastik dan polusi lainnya, dapat memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi biru.
7. Inovasi dan teknologi: Tingkat adopsi teknologi dan inovasi sektor kelautan dan perikanan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memberikan dampak positif pada ekonomi biru.
8. Perubahan Iklim dan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan dampak perubahan iklim dan upaya keberlanjutan lingkungan di sektor kelautan.
9. Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait sektor kelautan dan perikanan.
10. Efektifitas pengelolaan kawasan perairan laut.

Sumatera Barat mempunyai 8 lokasi kawasan konservasi perairan laut yang dimanfaatkan untuk perikanan tangkap, budi daya laut, dan wisata bahari.

Gambar II-59

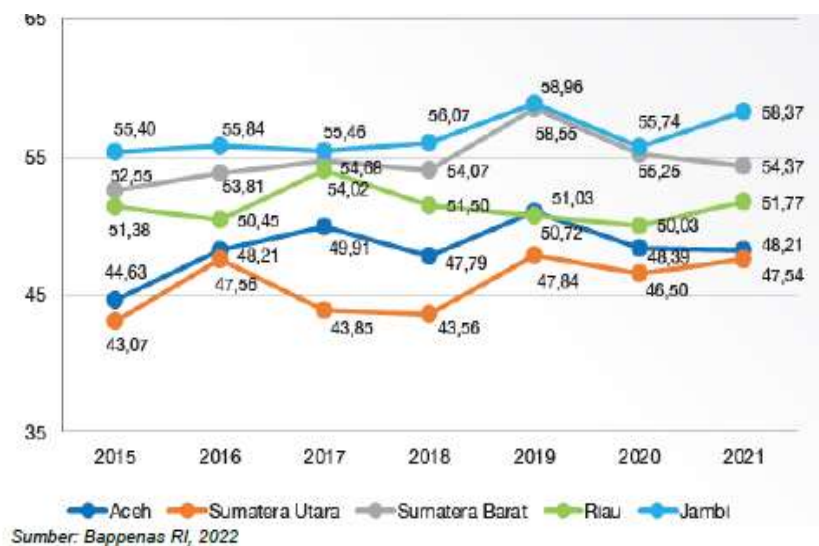
Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2021



Secara regional, nilai tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Barat pada peringkat ke 2 di Wilayah Sumatera setelah Provinsi Jambi. Berikut disajikan data perkembangan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia dan Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021

Gambar II-60

Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021



Berdasarkan hasil pemeringkatan terhadap data perkembangan skor indikator dan pilar Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2021, dapat diidentifikasi sejumlah hal sebagai berikut:

- a. Pilar Ekonomi pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 61,51 (Baik Tier 1). Kondisi tersebut memiliki 2 indikator dengan kategori sangat baik yaitu intensitas emisi (94,22) dan intensitas energi final (95,95), 1 indikator pada kategori baik tier 1 yaitu Produktivitas tenaga kerja sektor industri (55,59) serta 3 indikator pada kategori sedang, yaitu produktivitas pertanian (37,19, sedang tier 1), PDRB per Kapita (38,62, sedang tier 2) dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa (47,50, sedang tier 2). Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian adalah produktivitas pertanian sub indikator produktivitas padi yang berada pada kategori kurang seiring dengan penurunan nilai produktivitas padi yang berada di bawah nilai minimal indikator.
- b. Pilar Sosial pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 65,40 (Baik Tier 1). Kondisi tersebut memiliki 3 indikator pada kategori baik tier 2, yaitu rata-rata lama sekolah (70,70), angka harapan hidup (71,22) dan tingkat pengangguran (70,67), serta 1 indikator pada kategori sedang Tier 2, yaitu tingkat kemiskinan (49,00).
- c. Pilar Lingkungan pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori sedang dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 45,67 (Sedang Tier 2). Kondisi tersebut memiliki 2 indikator pada kategori Sangat baik yaitu Kualitas air permukaan pada parameter BOD (78,50), Kualitas udara pada parameter NO₂ (89,33), 1 indikator pada kategori sedang yaitu Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (48,80, Sedang Tier 2) dan Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer (36,36, Sedang Tier 1), serta 2 indikator pada kategori kurang yaitu Persentase lahan gambut terdegradasi/ penurunan tutupan gambut (5,73) dan persentase penurunan emisi kumulatif dari basis data (15,33).

Gambar II-61
Perkembangan Indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2021



Berdasarkan gambar di atas, meski secara nasional pilar dengan nilai komposit paling baik untuk sebagian besar provinsi di Indonesia adalah pilar ekonomi, tetapi kondisi tersebut tidak demikian yang terjadi pada Provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit paling baik tersebut pada pilar sosial. Hal ini secara tidak langsung mencirikan kekhususan karakteristik masyarakat di Sumatera Barat yang tentunya memerlukan perlakuan dan pendekatan yang berbeda dari daerah lainnya dalam upaya peningkatan nilai Indeks Ekonomi Hijau kedepannya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1.5 Penerapan Ekonomi Hijau

Secara umum, konsumsi energi di Indonesia masih didominasi dari sektor energi fosil. Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% energi yang dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Barat berasal dari energi fosil. Hal ini tidak sejalan dengan keterbatasan ketersediaan energi fosil di Sumatera Barat. Ini disebabkan oleh penggunaan energi fosil yang tinggi pada

sektor transportasi dan ketenagalistrikan. Keterbatasan ketersediaan energi fosil ini tentu akan menjadi permasalahan di masa depan.

Berdasarkan perkembangan indikator pembentuk pilar Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2021, terdapat beberapa tantangan ataupun hambatan yang akan dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

1. Pilar Ekonomi

Berdasarkan 6 indikator Pilar Ekonomi penyusun Indeks Ekonomi Hijau terdapat 3 indikator yang berada pada kategori sedang, yaitu:

A. Produktivitas pertanian yang berada pada kategori sedang tier 1 (37,19),

Produktivitas pertanian disusun oleh 3 komponen indikator, yaitu produktivitas padi, kelapa sawit dan perikanan budi daya.

Produktivitas padi merupakan komponen indikator utama yang menyebabkan rendahnya nilai Indikator produktivitas pertanian yang berada pada kategori kurang (target minimal 5,00 ton/hektar/tahun dan maksimal 11,00 ton/hektar/tahun). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya nilai produktivitas padi yang berada di bawah batas minimal 5 ton/hektar/tahun. Sementara, tren pertumbuhannya yang semakin menurun terutama dari tahun 2017 dengan nilai produktivitas sebesar 5,20 ton/hektar/tahun menjadi 4,84 ton/hektar/tahun pada tahun 2021.

Produktivitas Kelapa Sawit dengan nilai minimal 2 ton/hektar/tahun dan maksimal 5 ton/hektar/tahun memiliki nilai tren pertumbuhan yang positif di atas nilai minimalnya dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 3,70 ton/hektar/tahun dan skor sebesar 56,67 (baik tier 1). Meski terus tumbuh positif, peningkatan nilai produktivitas tentu perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan tersebut menjadi lebih baik.

Produktivitas perikanan budi daya dengan nilai minimal 3 ton/hektar/tahun dan maksimal 19 ton/hektar/tahun memiliki nilai tren pertumbuhan yang terus

tumbuh positif. Hal ini bisa dilihat dari nilai produktivitas pada tahun 2021 sebesar 3,70 ton/hektar/tahun dan skor sebesar 54,90 (baik tier 1). Kondisi ini mengalami penurunan nilai produktivitas terutama dari tahun 2018 sebesar 30,49 ton/hektar/tahun menjadi 11,78 ton/hektar/tahun pada tahun 2021. Hal ini tentu perlu upaya yang lebih baik lagi untuk dapat mendorong produktivitas perikanan budi daya agar mampu meningkatkan nilai produktivitasnya dan mendorong kenaikan indikator produktivitas pertanian serta indeks ekonomi hijau di masa depan.

B. PDRB per Kapita yang berada pada kategori sedang tier 2 (38,62)

Perkembangan indikator PDRB per kapita dengan nilai minimal 729 USD/Kapita dan maksimal 11.673 USD/Kapita terus tumbuh dengan tren pertumbuhan positif. Namun demikian, meski nilai PDRB per Kapita pada tahun 2021 sebesar 2.127,49 USD/Kapita masih menempatkan skor PDRB per kapita pada posisi 38,62 dan kategori sedang tier 2. Hal ini tentunya memerlukan upaya yang lebih baik lagi agar mampu mendorong kenaikan PDRB Per kapita di Sumatera Barat.

C. Produktivitas tenaga kerja sektor jasa yang berada pada kategori sedang tier 2 (47,50)

Perkembangan indikator Produktivitas tenaga kerja sektor jasa dengan nilai minimal Rp. 20.000.000/orang dan maksimal 200.000.000/orang terus tumbuh dengan tren pertumbuhan positif. Namun demikian, nilai PDRB per kapita pada tahun 2021 sebesar 59.711.420,34/orang masih menempatkan skor PDRB per kapita pada skor 38,62 dan kategori sedang tier 2. Hal ini tentunya memerlukan upaya yang lebih baik lagi agar mampu mendorong 2.

2. Pilar Sosial

Meski saat ini pilar sosial berada pada kategori Baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 65,40 (Baik Tier 1), namun kondisi tersebut mengalami

penurunan nilai skor pada indikator tingkat kemiskinan menjadi 49,00 (sedang Tier 2) dan tingkat pengangguran menjadi 70,67 (Baik Tier 2) pada tahun 2021.

- a. Secara umum tren penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tersu mengalami penurunan. Penurunan skor tingkat kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 6,63% dimungkinkan karena sejalan dengan berakhirnya program bantuan pemerintah terhadap penanganan dampak pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
- b. Terjadi kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap meningkatnya tingkat pengangguran dari 5,38% pada tahun 2019 menjadi 6,88 % di tahun 2020 dan 6,52% di tahun 2021.

Berdasarkan kondisi di atas maka upaya untuk mendorong penurunan kedua indikator di atas tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam upaya mendorong kenaikan pilar sosial dan menaikkan Indek Ekonomi Hiau di Provinsi Sumatera Barat kenaikan PDRB Per kapita di Sumatera Barat.

3. Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan merupakan pilar yang paling rentan memiliki nilai skor terendah diantara pilar lainnya dan berada pada kategori sedang dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 45,67 (Sedang Tier 2). Berdasarkan 6 indikator penyusun pilar lingkungan, terdapat 2 indikator yang berada pada kategori kurang, yaitu persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut) dan persentase penurunan emisi kumulatif dari basis data, serta 2 indikator yang berada pada kategori sedang yaitu persentase luas tutupan hutan dan bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer.

- a. Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut) yang diharapkan mengalami penurunan justru mengalami kenaikan yang berdampak pada penurunan nilai skor setiap tahunnya. Kondisi ini terjadi seiring dengan semakin luasnya lahan gambut yang terdegradasi oleh

pembangunan sebagai akibat terjadinya perubahan alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan oleh masyarakat, perusahaan ataupun kepentingan pembangunan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian dan upaya signifikan untuk membatasi akses terhadap pemanfaatan lahan gambut dan pengembalian fungsi lahan gambut untuk meningkatkan persentase lahan gambut yang mengalami degradasi di Sumatera Barat.

- b. Persentase penurunan emisi kumulatif yang semakin menurun terutama terjadi pada periode tahun 2018-2021 dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 15,22%. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya nilai emisi kumulatif yang dicapai karena meningkatnya pencemaran udara di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang antara lain disebabkan oleh kebakaran hutan/lahan yang semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir.
- c. Persentase luas tutupan hutan yang diharapkan semakin meningkat semakin mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini tidak jauh berbeda dari kondisi lahan gambut yang terus terdegradasi sebagai akibat terjadinya alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan oleh masyarakat, perusahaan ataupun kepentingan pembangunan lainnya.
- d. Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer memiliki tren yang semakin meningkat setiap tahunnya dan berada pada kategori sedang semenjak tahun 2020 (13,18%), yang mana ini naik menjadi 15,27% pada tahun 2021.

Berdasarkan hal di atas, pengembangan ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Barat akan melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa permasalahan umum ekonomi hijau tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan seperti hutan, air, atau tanah yang tidak dikelola dengan bijaksana sehingga dapat mengancam keberlanjutan ekonomi hijau.

2. Polusi dan pencemaran lingkungan seperti udara, air, dan tanah dapat merugikan ekosistem dan kesehatan manusia sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi polusi dan pencemaran menjadi penting dalam meraih tujuan ekonomi hijau.
3. Ketergantungan pada sumber energi fosil yang dapat menghambat bagi perkembangan ekonomi hijau, sehingga diperlukan upaya transisi menuju energi terbarukan.
4. Kurangnya Infrastruktur hijau seperti transportasi umum yang ramah lingkungan, sistem manajemen limbah yang efisien, dan bangunan berkelanjutan sehingga perlu terus dikembangkan.
5. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh implementasi proyek-proyek ekonomi hijau sehingga perlu penekanan pada inklusivitas dan partisipasi masyarakat lokal.
6. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau serta kurangnya pendidikan lingkungan dapat menjadi hambatan dalam mendukung praktik-praktik berkelanjutan.
7. Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan pemerintah yang menjadi hambatan bagi investasi dalam inisiatif ekonomi hijau.
8. Kurangnya dukungan finansial atau investasi untuk proyek-proyek hijau yang disebabkan oleh kebutuhan investasi awal yang signifikan pada proyek-proyek yang berkelanjutan.
9. Dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi pertanian, ketersediaan air, dan sektor-sektor lainnya.

Perikanan

Sebagian besar nelayan Provinsi Sumatera Barat adalah nelayan tradisional dan nelayan kecil yang secara teknis masih didominasi usaha skala mikro dan kecil. Beberapa tantangan terkait permasalahan yang dihadapi oleh nelayan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya produktivitas sektor perikanan sebagai sumber protein hewani dan risiko kerentanan pangan global, serta belum optimalnya pemanfaatan

potensi ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan :

- a. Belum optimalnya penyediaan benih ikan untuk usaha budi daya laut dan air payau, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang bersertifikat.
 - b. Kapasitas nelayan melaut masih di bawah standar, baik dari sisi alat penangkapan maupun jenis kapalnya memerlukan modernisasi.
 - c. Permasalahan perizinan dari pusat terkait penggunaan kapal di atas 30 GT terutama untuk jenis bagan di Sumatera Barat.
 - d. Terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang mana ini memerlukan revitalisasi.
 - e. Rantai distribusi ikan belum optimal disebabkan oleh minimnya ketersediaan ruang dingin untuk penyimpanan (cold storage).
 - f. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.
 - g. Rendahnya nilai ekspor hasil perikanan Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan oleh kegiatan ekspor yang dilakukan melalui provinsi lain.
 - h. Tingginya biaya produksi perikanan budi daya yang disebabkan oleh harga pakan yang selalu meningkat.
 - i. Belum tercukupinya kebutuhan BBM untuk kapal perikanan di Provinsi Sumatera Barat, dimana kebutuhan solar mencapai 39 juta liter/tahun dan pertalite 51.7 juta liter/tahun.
2. Degradasi ekosistem laut dan pesisir serta perairan umum yang berdampak pada kerentanan daya dukung ekosistem laut seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim yang antara lain dipengaruhi oleh:
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam praktik penangkapan ikan, sehingga merusak ekosistem dan mengancam kelestarian sumber daya ikan (destructive fishing dan IUU fishing).

- b. Pembangunan pesisir, transportasi dan pariwisata yang tidak berkelanjutan, seperti wilayah budi daya perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah dan tidak berizin.
 - c. Banyaknya sampah di laut.
 - d. Terjadinya pemutihan karang (coral bleaching) akibat perubahan iklim
 - e. Konsekuensi dari meningkatnya pemanasan global.
3. Pengelolaan danau prioritas Singkarak dan Maninjau sebagai sentra produksi perikanan budi daya yang terkendala oleh kerusakan ekosistem danau.

Ekonomi Biru

Berbagai permasalahan pembangunan terkait Indeks Ekonomi Biru antara lain sebagai berikut:

- a) Overfishing dan penangkapan ilegal yang disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan dan praktik penangkapan ilegal yang merugikan ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan merugikan mata pencaharian nelayan
- b) Pencemaran laut, terutama oleh limbah plastik dan bahan kimia, serta polusi lainnya yang dapat merusak ekosistem laut, mengancam kehidupan laut, dan memengaruhi sektor pariwisata laut.
- c) Keterbatasan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan dermaga yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi biru dan distribusi produk kelautan.
- d) Rendahnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan kebijakan ekonomi biru dapat menghambat keberlanjutan
- e) Industri pengolahan hasil perikanan didominasi oleh industri skala kecil.
- f) Industri pariwisata bahari di Kabupaten Kepulauan Mentawai (e.g. surfing) banyak dikuasai oleh PMA.

- g) Tingkat kesejahteraan nelayan termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi biru dan kesejahteraan masyarakat pesisir
- h) Keterbatasan akses dan adopsi teknologi inovatif dalam sektor ekonomi biru dapat menghambat peningkatan efisiensi dan daya saing
- i) Perubahan iklim yang berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem laut yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut sehingga berdampak pada kondisi lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan
- j) Ketergantungan pada sektor ekonomi biru tertentu tanpa diversifikasi yang memadai dapat membuat wilayah tersebut rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan ekonomi.
- k) Ketidakpastian atau ketidakkonsistenan kebijakan dan regulasi terkait ekonomi biru dapat menciptakan ketidakpastian investasi dan pengembangannya.
- l) Terjadinya penurunan kesehatan ekosistem terumbu karang dan lamun di Kawasan konservasi laut Sumatera Barat

3.1.15 Lingkungan Hidup

Di sub sektor limbah rumah tangga terlihat bahwa sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman. Kondisi ini didasarkan pada persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi yang belum optimal, belum sesuai dengan standar SNI. Hal ini ditunjang juga oleh kurangnya kesadaran peran, partisipasi, dan permintaan masyarakat terhadap sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pembukaan lahan hutan dan kawasan konservasi untuk perkebunan dan pemukiman yang menyebabkan tanah longsor, erosi, banjir, kekeringan dan mengurangi keanekaragaman hayati.
2. Aktivitas perburuan satwa liar yang mengancam kelestarian di habitatnya seperti penembakan burung, reptil, mamalia dan lain-lain.
3. Pembukaan lahan tambak udang disepanjang pesisir Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan RTRW dan tidak berijin menimbulkan pencemaran perairan pesisir (Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat).
4. Penangkapan ikan yang merusak lingkungan dengan memakai alat dan bahan penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan laut, sungai dan danau seperti mini trawl dan bahan putas.
5. Perusakan ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove sebagai ekosistem pesisir
6. Pemanfaatan yang masif dan perusakan ekosistem pulau kecil untuk resort, wisata pantai dan wisata bahari.
7. Pengaruh perubahan iklim memengaruhi distribusi spesies, ukuran, waktu reproduksi, migrasi, frekuensi hama dan penyakit hewan dan tumbuhan.
8. Pencemaran lingkungan air tawar, air laut dan daratan yang mengurangi keanekaragaman hayati.

Invasi spesies asing baik yang sengaja atau tidak sengaja yang merusak habitat, sehingga menjadi kompetitor dan membunuh tanaman/hewan asli.

3.1.16 Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Ketersediaan Pangan

Permasalahan Pangan mencakup 3 aspek, yaitu :

1. Aspek ketersediaan pangan
 - a. Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi dan ketersediaan air

- b. Skala usaha pertanian yang masih didominasi oleh usaha tani kecil
- c. Laju konversi lahan yang cukup tinggi dan produktivitas lahan yang mengalami levelling off
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata
- e. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas belum dilaksanakan secara masif
- f. Tingginya food loss and waste
- g. Regenerasi petani berjalan lambat
- h. Kurangnya tingkat keterampilan petani

2. Aspek Keterjangkauan Pangan

- a. Deindustrialisasi dini dan produktifitas sektor pertanian yang masih rendah
- b. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil)
- c. Sebaran wilayah produksi di daerah daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen
- d. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.
- e. Terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan
- f. Jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 318,96 juta jiwa di tahun 2045 (sumber survei penduduk antar sensus 2015)
- g. Stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi

3. Aspek Pemanfaatan Pangan

- a. Pergeseran pola konsumsi pangan ke arah western diet, fast food dan industrial food
- b. Meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli

- c. Keamanan pangan akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat
- d. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif
- e. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi
- f. Triple burden malnutrition yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (overweight dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi

3.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Daerah

A. Penerapan Ekonomi Hijau

Isu strategis pembangunan Ekonomi Hijau di Sumatera Barat diantaranya :

1. Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan terutama hutan, tanah, dan air melalui pendekatan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
2. Perluasan dan peningkatan infrastruktur hijau seperti transportasi berkelanjutan, sistem energi terbarukan, dan ketersediaan fasilitas hijau lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan pengembangan proyek-proyek ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan dan akseptabilitas sosial.
4. Pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan dan pelestarian keindahan alam local dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
5. Pendekatan Inovatif dan Teknologi Hijau melalui adopsi teknologi dan inovasi berkelanjutan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian berkelanjutan, industri ramah lingkungan, dan energi terbarukan.

6. Pengelolaan Limbah secara efektif dan mendorong praktik daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
7. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan inklusif untuk menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai sektor.
8. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang bermungkinan terjadi.
9. Keharusan untuk memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal, perizinan yang jelas, dan peraturan lingkungan.
10. Peningkatan pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk mendorong perilaku yang berkelanjutan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis.

B.Ketahanan Energi, Air dan Pangan

Ketahanan Pangan

Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun. Ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan mengalami penurunan. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Penurunan kualitas lahan dan air juga berdampak terhadap menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan.

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Upaya perkuatan ketahanan pangan merupakan upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat

di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektifitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru serta perubahan pola konsumsi dan produksi. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, hal ini dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait isu kerawanan pangan. Untuk itu perlu ditangani juga terkait isu cadangan pangan. Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun ke depan. Dalam hal distribusi pangan, perlu diperhatikan isu informasi harga, pasokan dan akses pangan.

ARAH PEMBANGUNAN 5 : PENERAPAN EKONOMI HIJAU						
18.a	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1) Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui 1) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui 1) City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
				koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi	hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. 2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya	daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada Kawasan perkotaan
18. b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	1. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi 2. Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan 3. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan	1. Akselerasi penyesuaian harga EBT yang kompetitif dan ekonomis. 2. Percepatan substitusi pembangkit EBT terhadap pembangkit fosil 3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri.	1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi terbarukan serta akses untuk masyarakat terhadap energi sehingga tercipta kemudahan akses masyarakat memperoleh energi 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konservasi energi	1. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi dalam mengelola energi terbarukan 2. Penggunaan gas dan bahan bakar nabati seperti Bioetanol, Biodiesel dan Bioavtur terus ditingkatkan

			4. Penguatan kelembagaan dan pendanaan			
--	--	--	--	--	--	--

ARAH PEMBANGUNAN 16 : BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN

43.b	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : (1) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. (2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. (3) Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. (4) Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. (5) Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi. (6) Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. (7) Pengurangan laju konversi lahan. (8) Pemantauan fluktuasi harga	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : (1) Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tatakelola pangan yang inklusif. (2) Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan. (3) Peningkatan akses, dan pemanfaatan pangan. (4) Perbaikan pengaturan pola makan. (5) Peningkatan promosi pangan lokal.	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan : (1) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. (2) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. (3) Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian. (4) Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional : (1) Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. (2) Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.
------	--------------------------------------	--	---	--	---	--

			komoditi pangan (inflasi). (9) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.			
--	--	--	---	--	--	--

Tabel V-2 Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Sasaran Visi

No	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025- 2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.1.2	Kontribusi PDB Maritim (%)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui : a) Implementasi kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. b) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. c) Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut untuk melestarikan ekosistem laut. 2) Infrastruktur Kelautan dan Konektivitas Maritim melalui : a) Investasi dalam infrastruktur kelautan, termasuk pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penunjang. b) Peningkatan konektivitas maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru. 3) Pariwisata bahari yang Berkelanjutan melalui : a) Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan menekankan pelestarian lingkungan. b) Pelibatan masyarakat setempat dalam manajemen dan keuntungan dari pariwisata. 4) Pemberdayaan	1) Diversifikasi Ekonomi Biru melalui : a) Stimulasi investasi dan inovasi dalam sektor-sektor baru ekonomi biru, seperti energi laut terbarukan dan bioteknologi kelautan. b) Diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan dengan tujuan pasar diluar Provinsi Sumatera Barat dan ekspor ke luar negeri. c) Peningkatan nilai tambah produk-produk kelautan melalui teknologi dan pemasaran yang inovatif. 2) Teknologi dan Inovasi melalui : a) Penelitian dan pengembangan teknologi berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. b) Promosi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya kelautan. 3) Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui : a) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui diversifikasi ekonomi dan akses yang	1) Pengembangan Klaster Ekonomi Biru melalui : a) Pembentukan klaster ekonomi biru untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, peneliti, dan pemerintah. b) Inisiatif kewirausahaan dan dukungan bagi start-up di sektor ekonomi biru. 2) Kebijakan Pendukung melalui : a) Pemantapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru. b) Stimulasi investasi swasta melalui insentif fiskal dan kebijakan lainnya. 3) Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim melalui : a) Integrasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan ekonomi biru. b) Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan.	1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya melalui : a) Penerapan teknologi pengelolaan sumber daya kelautan yang tepat guna. b) Meningkatkan kapasitas monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi keberlanjutan. 2) Kolaborasi Internasional melalui : a) Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan komunitas global untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi biru. b) Partisipasi aktif dalam inisiatif dan perjanjian internasional terkait kelautan dan perikanan. 3) Pengembangan Ekosistem Inovasi melalui : a) Peningkatan dukungan untuk riset dan pengembangan dalam ekosistem inovasi kelautan. b) Pengembangan kapasitas lokal untuk penelitian dan inovasi di sektor ekonomi biru. 4)

			Masyarakat Lokal melalui : a) Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen sumber daya kelautan. b) Penguatan kelembagaan lokal untuk partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. 5) Pengurangan Pencemaran Laut dan Limbah Plastik melalui : a) Implementasi kebijakan pengurangan plastik dan manajemen limbah laut yang efektif. b) Kampanye kesadaran untuk mengurangi pencemaran laut di kalangan masyarakat.	lebih baik ke layanan sosial. b) Pengembangan mata pencaharian alternatif nelayan pada waktu musim paceklik. c) Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah pesisir		Peningkatan Literasi Lingkungan dan Sosial melalui : a) Program pendidikan dan kampanye literasi lingkungan untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan konservasi.
--	--	--	--	---	--	--

ARAH PEMBANGUNAN 15 : LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS						
41.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar golbal. 3) Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan periaran laut. 2) Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. 3) Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi. 4) Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan	Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan melalui : 1) Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 3) Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 4)	Pengembangan Sistem Kerjasama Pengelolaan Keanekaragaman Hayati antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan melalui : 1) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 2) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan

				keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal.	Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis	prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3)
					kelestarian keanekaragaman hayati. 5) Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal	Peningkatan kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
.					transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai	

SV.2	Pergentansan kemiskinan dan ketimpangan		Pergentasan kemiskinan dan ketimpangan			
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan(%)	Tingkat Kemiskinan(%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5) Percepatan pembangunan dan	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai) melalui bertambahnya demand. 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi,	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui : 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).

			penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		bantuan/subsidi	
--	--	--	--	--	-----------------	--

ARAH PEMBANGUNAN 3 : PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

No	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
08.	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep.	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai) melalui bertambahnya demand. 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan	Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui : 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).

			Mentawai). 6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan	
--	--	--	---	--	---	--

